



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201930005, 15 Februari 2019

Pencipta

Nama : **Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si**
Alamat : Kavling Sadang Rt 002 Rw 011 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung 40624, Bandung, Jawa Barat, 40624
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si**
Alamat : Kavling Sadang Rt 002 Rw 011 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Bandung, Jawa Barat, 40624
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH KABUPATEN TASIKMALAYA (Studi Kasus Pilkada Tahun 2011 Dan Pemilu Legislatif DPRD Tahun 2014)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 14 Agustus 2015, di Bandung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000135018

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERILAKU PEMILIH
DI KABUPATEN TASIKMALAYA
(Studi Kasus Pilkada Tahun 2011 dan Pemilu Legislatif
DPRD Tahun 2014)**

Laporan Penelitian Individual
Mendapat Bantuan Dana dari DIPA-BOPTAN UIN SGD
Bandung Tahun Anggaran 2015
Sesuai dengan Kontrak No: Un.05/V.2/PP.00.9/126d-286/2015



Oleh:
Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si
NIP. 197002011997031003

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2015

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERILAKU PEMILIH
DI KABUPATEN TASIKMALAYA
(Studi Kasus Pilkada Tahun 2011 dan Pemilu Legislatif
DPRD Tahun 2014)**

Executive Summary

Laporan Penelitian Individual

Mendapat Bantuan Dana dari DIPA-BOPTAN UIN SGD

Bandung Tahun Anggaran 2015

Sesuai dengan Kontrak No: Un.05/V.2/PP.00.9/126d-286/2015



Oleh:

Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si

NIP. 197002011997031003

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2015

DAFTAR ISI

I. Abstrasi.....	1
II. Pendahuluan	2
III. Landasan Teoritis	5
IV. Metodologi Penelitian	11
V. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	14
VI. Kesimpulan	43
VII. Daftar Pustaka.....	44

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini, berawal dari pengamatan terhadap fenomena politik khususnya tentang perilaku pemilih, sebab perubahan sistem politik secara umumnya akan mempengaruhi perilaku politik. Akan tetapi realitas politik khususnya dikabupaten Tasikmlaya melahirkan konsistensi politik yang cukup kuat, sebagai basis dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Semenjak Orde Baru Tasaikmalaya sebagai basis popndok pesantren senantiasa menjadi basis dari PPP, setelah jatuh rezim Orde Baru Kabupaten Tasikmalaya tetap konsisten, dimana setiap kompetisi politik senantiasa dimenangkan PP. Dalam penelitian ini akan dikaji kontestasi politik pada pemilukada tahun 2011 dan pemilu legislatif anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014.

Penelitian ini terbagi pada empat bab, yakni mulai dari bab pendahuluan, bab kajian teoritis, bab hasil

penelitian dan pembahasan serta bab kesimpulan dan saran.

Semoga penelitian ini bermanfaat dan membawa pencerahan bagi para pembaca, akademisi dan praktisi partai.

Semoga bermanfaat.

Terimakasih,

Bandung, Agustus 2015

Peneliti,

Dr. Fauzan Ali asyid, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Pernyataan Orsinalitas	v
Abstrak	1
Pendahuluan	2
Kajian Teori	5
Metodologi Penelitian	8
Hasil Penelitian dan Pembahasan	10
Kesimpulan dan Saran	25
Daftar Pustaka	28

PERNYATAAN ORSINALITAS

Penelitian ini, adalah hasil karya cipta pribadi penulis sendiri yang dapat diklaim sebagai harta kekayaan intelektual. Seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk di dalam karya ini telah saya nyatakan dengan benar atas dasar kaidah-kaidah akademis.

Penulis,

Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si

ABSTRAKSI

Pemilihan umum merupakan salah satu media penyaluran kedaulatan rakyat terhadap pemimpin politik atau wakil rakyat di lembaga legislatif. Dalam alam demokrasi perilaku pemilih akan menentukan keberlangsungan sebuah pemerintahan. Disinilah letak urgensinya perilaku pemilih dalam demokrasi. Penelitian perilaku pemilih tersebut, akan dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya dengan meneliti dua momentum pemilu yakni pilkada Bupati/wakil bupati tahun 2012 dan Pemilu lebiglatis tahun 2014.

Permasalahan dalam penelitian ini antara lain; Apa yang melandasi perilaku pemilih masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya pada Pileg 2014 dan Pilkada tahun 2012?. Faktor apa saja yang menyebabkan konsisten perilaku pemilih Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya? Bagaimana polarisasi perilaku pemilih di Kabupaten Tasikmalaya? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner kepada masyarakat.

Perspektif teoritik bahwa perilaku pemilih akan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor rasionalitas pemilih. Secara sosiologis masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya tidak mengalami perubahan sehingga setiap pemilih merasa bersama-sama harus memilih PPP. Selain itu, secara faktor psikologis, PPP begitu dekat sehingga sulit menghindari dari pilihan lain. Padahal kalau pendekatan organisasi kemasyarakatan, dimana di Tasikmalaya merupakan basis NU. Partai yang berafiliasi langsung dan dilahirkan NU adalah PKB, tetapi PKB belum mampu mengungguli PPP. Kemudian dari aspek rasionalitas pemilih. Rasionalitas pemilih dapat dilihat dari sisi jenjang pendidikan dan arus informasi. Kabupaten Tasik adalah daerah yang cukup pesat dalam pembangunan sehingga pesantren atau sekolah-sekolah telah marak dan mudah diakses masyarakat sehingga angka melek huruf cukup tinggi, begitu juga dengan arus informasi dimana media cetak lokal cukup banyak begitu juga dengan media elektronik baik radio maupun TV, tetapi pada realitasnya belum melahirkan perubahan politik baru.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
Kata Pengantar	ii
Pernyataan Orsinalitas.....	iii
Abstrak.....	iv
Abstract.....	v
Daftar Isi	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka	10
B. Kerangka Pemikiran	14

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Analisa Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum	31
B. Hasil penelitian dan penemuannya	52
C. Pembahasan/Analisis.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah salah satu sarana demokrasi, oleh karena itu pemilu menjadi harapan untuk setiap pemerintahan dan negara yang mempunyai kepentingan dalam upaya mewujudkan kehidupan demokrasi di negaranya termasuk Indonesia. Aktualisasi demokrasi sebenarnya terletak pada sejauh mana kehendak atau aspirasi rakyat terakomodir dan terdapat media penyaluran sewajarnya. Hal inilah yang senantiasa menjadi tolak ukur serta penilaian tentang sejauhmana kehidupan demokrasi tersebut berkembang dalam satu negara.

Maswadi Rauf mengatakan bahwa inti demokrasi adalah peranan yang besar dari rakyat dalam menentukan para penguasa politik, sehingga kewenangan penguasa politik tersebut dalam melahirkan keputusan-keputusan memiliki legitimasi. Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya peranan rakyat seperti itu adalah agar pengaturan yang dijalankan oleh penguasa politik terhadap rakyat dapat berjalan sesuai dengan

kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan penguasa politik sendiri.¹

Terdapat dua konsep dasar yang menjadi prioritas dalam mendefinisikan demokrasi yakni kebebasan/persamaan (*freedom/equality*) dan kedaulatan rakyat. Dua konsep dasar ini menjadi indikator utama dalam membangun tegaknya demokrasi. Konsep kebebasan dan persamaan di antara sesama manusia melahirkan beberapa persyaratan yang penekanannya pada individu, persetujuan sebagai dasar dalam hubungan antar manusia. Persamaan semua manusia, keanekaragaman, hak suara yang luas, dan kebebasan berbicara dan berkumpul. Konsep kedaulatan rakyat menghasilkan beberapa persyaratan demokrasi, yaitu negara sebagai alat, *rule of law*, pemilihan umum yang bebas, terbuka, adil, jujur, berkala, dan kompetitif, pemerintah yang tergantung pada parlemen, dan pengadilan bebas.

Demokrasi diyakini sebagai sebuah mekanisme politik yang dapat melindungi kebebasan rakyat dengan memberikan tugas kepada pemerintah untuk melindungi rakyat dalam menikmati kebebasan. Demokrasi menuntut adanya partisipasi

¹ Maswadi Rauf, *Indonesia dan Komunikasi Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 30. Lihat juga David E. Apter 1985. *Pengantar Analisa Politik* (Jakarta: LP3ES, 1985) hlm.137

aktif dari rakyat dalam proses pengambilan kebijakan politik. Rakyat dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

Salah satu bentuk saluran hak rakyat untuk berpartisipasi di dalam proses pemerintahan adalah melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilu memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan pejabat-pejabat yang menduduki jabatan-jabatan publik. Chusnul Mar'iyah mengatakan bahwa proses lain dari pemilu adalah meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses politik sehingga hasil pemilu dapat dipercaya dan mendapatkan legitimasi oleh masyarakat luas yang pada gilirannya stabilitas politik dapat terwujud.²

Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan yang kuat di mata publik. Kekuasaan akan mudah goyah bila kemenangan dalam pemilu diraih dengan cara-cara yang tidak demokratis. Legitimasinya lemah, rentan konflik dan memicu prahara sosial. Pemilu yang berlangsung secara tidak demokratis juga akan melahirkan konflik horizontal dan merusak kohesi sosial yang dalam jangka panjang akan

² Chusnul Mar'iyah dalam Ari Pradhanawati, *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal* (Surakarta: KOMPIP, 2005), hlm 48-65

merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga Pemilu harus dapat dilakukan secara demokratis tetapi tidak merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pemilu dapat menjadi sumber konflik yang bukan saja terjadi di tingkat elit tetapi pada tingkat grassroot.

Secara substantif, pemilu akan berlangsung secara demokratis bila mampu menyediakan ruang publik (*public sphere*) yang seluas-luasnya bagi segenap rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus bisa mengartikulasikan aspirasi, kehendak dan kepentingannya secara merdeka. Rakyat harus bebas memanfaatkan ruang publiknya dengan menentukan calon pemimpinnya sendiri baik yang akan mengisi kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Secara prosedural, tahapan-tahapan pemilu yang dilakukan bisa menjelmakan hak-hak substantif rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan dengan konsisten memegang teguh prinsip-prinsip keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Kendati, perlu dihindari proses-proses politik yang dilalui tidak terjebak pada demokrasi prosedural yang justru menutupi esensi dan substansi demokrasi itu sendiri.

Pada dasarnya ada tiga hal dalam tujuan pemilihan umum.³ Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan). Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Kedua, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. *Ketiga*, pemilihan umum merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta, PT. Gramedia, 1992)

B. Perumusan Permasalahan

Dalam proses pemilihan umum terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan pemilu antara lain; pertama perundang-undangan pemilu. Kedua, penyelenggara pemilu. Ketiga, peserta pemilu dan keempat, perilaku pemilih. Khusus berkaitan dengan perilaku pemilih merupakan unsur yang sangat dinamis terutama di era demokratisasi, perubahan-perubahan perilaku pemilih kerap terjadi di setiap even pemilu, baik pemulukada maupun pemilu legislatif.

Dalam penelitian ini akan mencoba membahas perilaku pemilih di Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Tasikmalaya dianggap sebagai basis Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena semenjak pemilu di era reformasi mulai pemilu tahun 1999 sampai pemilu 2014 partai PPP mendapatkan kemenangan baik di pemilu legislatif DPRD maupun di pilkada Bupati/wakil Bupati. Dalam penelitian ini akan di batasi pada dua momentum pemilihan yakni pemilihan Umum Legialtif (Pileg) DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2014 dan pilkada pada tahun 2011. Kedua even pemilu tersebut melahirkan pola perilaku pemilih yang sama/konsisten, dimana pada kedua pemilu tersebut dimenangkan oleh partai yang sama yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal tersebut menjadi unik karena di

kabupaten/kota yang lainnya di Jawa Barat senantiasa melahirkan realitas politik yang berbeda, seperti di Kabupaten Bandung Pileg DPRD dimenangkan PDIP sedangkan Pilkada oleh Partai Golkar, di Kota Bandung untuk pileg DPRD dimenangkan Partai Golkar sedangkan Pilkada oleh PKS. Realitas tersebut menarik untuk dilakukan penelitian secara ilmiah dengan penelitian langsung kepada pemilih.

Berdasarkan realitas politik tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang sekaligus menjadi batasan dalam penelitian ini. Perumusan masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk pertanyaan masalah, yang antara lain:

1. Apa yang melandasi perilaku pemilih masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya pada Pileg 2014 dan Pilkada tahun 2012?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan konsisten perilaku pemilih Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana polarisasi perilaku pemilih di Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui apa yang melandasi perilaku pemilih masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya pada Pileg 2014 dan Pilkada tahun 2012.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konsisten perilaku pemilih Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya?
3. Untuk mengetahui bagaimana polarisasi perilaku pemilih di Kabupaten Tasikmalaya?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis terutama kajian-kajian yang berkaitan dengan gerakan politik Islam.
- b. Selain itu kegunaan penelitian ini, diharapkan akan mampu lebih memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang teori-teori politik Islam dengan melakukan memverifikasi teori.

Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan utuh perkembangan perilaku pemilih di Jawa Barat.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

Dalam teori perilaku pemilih melihat perilaku pemilih dalam sebuah pemilihan umum. Perilaku pemilih akan mempengaruhi proses dan hasil dari pemilihan umum itu sendiri, sebab pemilihan itu dilakukan untuk mendapatkan legitimasi politik dari masyarakat pemilih berkaitan dengan kepantasan seseorang menduduki jabatan politik. Dalam pemilihan umum yang demokratis rakyat menentukan pilihannya sendiri terhadap wakil-wakilnya.

Di Indonesia telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang menjelaskan pengaruh faktor sosiologis terhadap perilaku politik masyarakat dari berbagai aspek, sebab di Indonesia pada realitasnya terdapat pluralisme politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Burhan D Magenda yakni Pluralisme itu terbentuk dari berbagai macam “kebudayaan politik” lokal. Sebagai akibat dari pluralisme vertikal dan horizontal ini, maka terjadi pembelahan-pembelahan yang tajam dan sangat sukar dipertemukan. Pembelahan-pembelahan ini misalnya antara kaum santri Islam versus non-Islam, khususnya kaum abangan Jawa. Ada pula

pembelahan antara penganut Islam versus agama-agama lain. Ada pula pembelahan antara Jawa dengan bukan Jawa, antara penduduk asli versus penduduk keturunan Tionghoa, antara Pusat dengan Daerah, antara priyayi dan Bangsawan dengan orang biasa. Pembelahan-pembelahan ini membuat “kebudayaan politik” Indonesia sangat plural sifatnya dan harus merekonsiliasikan berbagai aliran, ideologi, suku, dan agama yang seringkali tidak hanya berbeda, tapi bahkan bertentangan satu sama lain.⁴

Salah satu peneliti yang terkemuka yaitu Geertz dalam studinya tentang orientasi *sosio-religius* masyarakat Jawa. Ia membagi masyarakat Jawa atas tiga kelompok/aliran, yakni abangan, santri dan priyayi. Ia menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Jawa adalah abangan. Kelompok abangan cenderung memilih partai berbasis *ideologi nasionalis-sekuler*, sedangkan kelompok santri cenderung ke partai Islam.⁵ Tipologi ini terjustifikasi ketika Herberth Feith melakukan analisis terhadap hasil pemilu 1955 di mana perspektif aliran ternyata masih mampu menjelaskan pola afiliasi dan perilaku

⁴ Burhan D Magenda dalam Ismid Hadad, *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 29-3

⁵ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (London: The Free Press, 1960).

politik pada masa itu, yang tercermin dari kemenangan PNI dan PKI yang berbasis *nasionalis-sekuler*.⁶

Analisis Geertz walaupun telah banyak dikritik tetapi masih sering dirujuk ketika menganalisa politik Indonesia. Yang penting dari uraian di atas adalah bahwa perilaku politik masyarakat Indonesia, ternyata untuk sebahagian masih dipengaruhi faktor-faktor *sosiologis-kultural*. Hal ini ditegaskan pula oleh Riswanda Imawan yang menyatakan bahwa norma kelompok menentukan norma dan tingkah laku individu.⁷ Pendekatan ini, menurut Dennis Kavanagh, *links the individual with the social structure, placing the vote in a social context*.⁸

Dengan kata lain, perilaku politik seseorang diasumsikan sebagai lampiran belaka dari asal-usul sosial seseorang. Kecenderungan inilah yang membuat David Denver menamakan paradigma ini sebagai pendekatan determinisme sosial (*social determinism approach*).⁹

⁶ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1999)

⁷ Riswanda Imawan, *Op. Cit.*

⁸ Dennis Kavanagh, *Op. Cit.*

⁹ Denver dalam Mohammad Asfar, *Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Politik*, dalam Jurnal Ilmu Politik 16 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 48

Dalam penelitian lain menunjukkan faktor ketokohan atau elit sangat mempengaruhi perilaku politik masyarakat sebagai mana studi yang dilakukan William Liddle dan Saeful Muzani yang menyimpulkan bahwa faktor ketokohan menjadi tulang punggung untuk meraih suara. Ketokohan Habibie di Golkar menjelaskan mengapa proporsi pemilih Golkar di Sulawesi pada Pemilu 1999 sangat besar (67%) dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Begitu juga faktor ketokohan Megawati berperan besar terhadap perolehan suara PDIP. Demikian juga faktor ketokohan Amien Rais dalam PAN dan Gus Dur dalam PKB.¹⁰

Kesimpulan yang sama juga terdapat pada hasil penelitian yang dilakukan J. Kristiadi tentang perilaku pemilih pada Pemilu 1987-1992 di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Studi yang dilakukan ini mengambil sampel masyarakat desa dan kota yang berbeda karakternya. Hasil yang diperoleh menyimpulkan bahwa interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia masih paternalistis, terutama antara anggota dan pimpinan masyarakat. Pimpinan masyarakat, baik formal maupun

¹⁰ William Liddle dan Mujani, Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan Nasional Menentukan Pilihan Partai Politik, dalam Harian Kompas edisi Jum'at, 1 September 2000.

informal, diperlakukan sebagai tokoh panutan dengan pengaruh dan derajat keterikatan yang berbeda-beda.¹¹

B. Kerangka Pemikiran

Pemilu merupakan media untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyat. Rakyat menentukan sendiri siapa yang pantas dan layak menjadi pemimpinnya. Pilihan rakyat akan sangat tergantung pada preferensi yang ada pada rakyat itu sendiri. Preferensi akan sangat sangat tergantung pada informasi yang diperoleh rakyat. Informasi yang diperoleh rakyat dapat diperoleh secara menyeluruh atau sebagian tergantung media informasi yang tersedia dan kemauan rakyat untuk mendapatkan informasi tersebut. Selain itu, apakah informasi tersebut bersifat netral atau sudah terpolarisasi oleh kepentingan sebagian pihak, sebab ada asumsi bahwa media informasi itu membangun konstruksi berpikir rakyat, sehingga pilihan rakyat dikonstruksi oleh pemilik media informasi itu sendiri.

Menurut Gabriel Almond, faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi

¹¹ Lihat J. Kristiadi, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia: Suatu Studi Kasus Tentang Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Pemilihan Umum tahun 1987-1992*, Disertasi, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1994.

politik, antara lain: pendidikan tinggi, status sosial-ekonomi dan keanggotaan dalam partai politik.¹² Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik, meliputi:¹³

- (a) Kelas: perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan pekerjaan yang serupa;
- (b) Kelompok/komunal: perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama
- (c) Lingkungan (*neighborhood*); perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu-sama lain
- (d) Partai; perorangan-perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
- (e) Golongan (*faction*); perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya

¹² Gabriel A. Almond, *Political Socialization and Culture and Political Participation*, dalam *Comparative Politics Today* (Boston: Little, Brown and Company, 1974).

¹³ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries*, alih bahasa Sahat Simamora (Jakarta: Rika Cipta, 1990), hlm. 21.

adalah pengelompokan patron-klien, artinya, satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal-balik di antara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

Studi tentang perilaku pemilih selama ini telah berkembang pesat. Namun demikian dikalangan para peneliti perilaku pemilih ada semacam arus utama teori tentang perilaku pemilih.¹⁴ Mashab tersebut yaitu *mashab Columbia* (Pendekatan Sosiologis) dan *mashab Michigan* (Pendekatan Psikologis). Baru setelah kedua mashab tersebut berkembang beberapa dasawarsa, lalu muncul Pendekatan Rasionalis *Mashab Columbia (Pendekatan Sosiologis)*

Teori Voting dari *Mashab Columbia*, yang dipelopori oleh *Columbia's University Bureau of Applied Social Science* pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial – usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan,

¹⁴ Lihat J. Kristiadi, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia* (Jakarta, Prisma LP3ES, 1996, No. 3-1996), hlm. 73-91. Lihat juga Steven Lukes, (ed). *Readings in Social and Political Theory Power* (Oxford: Blackwell, 1992). Fred Greenstein dan Nelson Polsby (eds). *Handbook of Political Science*, Vol 3. (Reading Mass: Addison-Wesley, 1977). Jeffrey M. Paige, *Political Orientation and Riot Participation*, dalam *American Sociological Review*, 1971.

latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya – memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih. Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam menentukan sikap, persepsi, dan orientasi seseorang. Dalam banyak penelitian, faktor agama, aspek geografis (kedaerahan), dan faktor kelas atau status ekonomi (khususnya di negara-negara maju) memang mempunyai korelasi nyata dengan perilaku pemilih. Hal ini didasari pemikiran bahwa subkultur tertentu memiliki *kognisi sosial* tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku tertentu. *Kognisi* yang sama antar anggota subkultur terjadi karena sepanjang hidup mereka dipengaruhi lingkungan fisik dan sosio-kultural yang relatif sama. Mereka dipengaruhi oleh kelompok-kelompok referensi yang sama. Karena itu, mereka memiliki kepercayaan, nilai, dan harapan yang juga relatif sama, termasuk dalam kaitannya dengan preferensi pilihan politik. Dengan pendekatan ini, para anggota subkultur yang sama cenderung mempunyai preferensi politik yang sama pula.¹⁵ Menurut Dennis Kavanagh menjelaskan

¹⁵ Lihat H.A. Bone & A. Ranney, *Politics and Voters* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1981) seperti yang dikutip Adman Nursal dalam *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu: Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 56-58.

bahwa pendekatan ini pada hakekatnya menjelaskan, bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh signifikan dalam menentukan perilaku pemilih.¹⁶

Dari uraian di atas jelasnya tingkah laku politik seseorang sangat dipengaruhi oleh keanggotaan mereka dalam kelompok sosial serta norma-norma yang dianut oleh kelompok sosial tersebut. Dengan demikian norma kelompok menentukan norma dan tingkah laku individu.¹⁷

¹⁶ Dennis Kavanagh, *Political Science and Political behavior* (London: George Allen & Unwin, 1980), hal 84., lihat juga Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).

¹⁷ Lihat Riswanda Imawan, *Dinamika Pemilih dalam Pemilu 1992*, Makalah, disampaikan pada pertemuan CSIS di Jakarta, 9 Juli 1993. Lihat juga Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Social Behavior* (London: George and Unwin, 1983), hlm. 83-87. Contoh hasil penelitian yang pernah dilakukan di AS dengan menggunakan pendekatan sosio-kultural menunjukkan bahwa pilihan terhadap suatu partai yang dilakukan oleh seorang anak cenderung mengikuti pilihan orang tua mereka. Orang-orang yang tergolong dalam WASPs (*white-Anglo-Saxon-Protestan*) yang umumnya memiliki status sosial ekonomi tinggi cenderung memilih Republik, dan orang-orang yang status sosialnya rendah, khususnya orang Katolik, orang Negro, orang keturunan Polandia, Irlandia dan Italia, yang mempunyai derajat rendah cenderung memilih Demokrat. Laki-laki lebih partisipatif dibanding wanitanya, karena adanya pandangan khususnya di tingkat masyarakat yang status sosialnya rendah bahwa tepatnya wanita adalah mengurus rumah mereka, masalah politik adalah dunia laki-laki. Sedangkan wanita-wanita yang berpendidikan tinggi, mereka menganggap bahwa urusan-urusan politik adalah urusan mereka juga. Lihat Austin Runney, *Sociology of Voting*, dalam *Politics and Voters*, ed. Hugh A. Bone and

Di Indonesia telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang menjelaskan pengaruh faktor sosiologis terhadap perilaku politik masyarakat dari berbagai aspek, sebab di Indonesia pada realitasnya terdapat pluralisme politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Burhan D Magenda yakni Pluralisme itu terbentuk dari berbagai macam “kebudayaan politik” lokal. Sebagai akibat dari pluralisme vertikal dan horizontal ini, maka terjadi pembelahan-pembelahan yang tajam dan sangat sukar dipertemukan. Pembelahan-pembelahan ini misalnya antara kaum santri Islam versus non-Islam, khususnya kaum abangan Jawa. Ada pula pembelahan antara penganut Islam versus agama-agama lain. Ada pula pembelahan antara Jawa dengan bukan Jawa, antara penduduk asli versus penduduk keturunan Tionghoa, antara Pusat dengan Daerah, antara priyayi dan Bangsawan dengan orang biasa. Pembelahan-pembelahan ini membuat “kebudayaan politik” Indonesia sangat plural sifatnya dan harus merekonsiliasikan berbagai aliran, ideologi, suku, dan agama yang seringkali tidak hanya berbeda, tapi bahkan bertentangan satu sama lain.¹⁸

Austin Runney (New York: McGraw Hill Book Company, 1981), hlm. 17-31.

¹⁸ Burhan D Magenda dalam Ismid Hadad, *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 29-3

Salah satu peneliti yang terkemuka yaitu Geertz dalam studinya tentang orientasi *sosio-religijs* masyarakat Jawa. Ia membagi masyarakat Jawa atas tiga kelompok/aliran, yakni abangan, santri dan priyayi. Ia menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Jawa adalah abangan. Kelompok abangan cenderung memilih partai berbasis *ideologi nasionalis-sekuler*, sedangkan kelompok santri cenderung ke partai Islam.¹⁹ Tipologi ini terjustifikasi ketika Herberth Feith melakukan analisis terhadap hasil pemilu 1955 di mana perspektif aliran ternyata masih mampu menjelaskan pola afiliasi dan perilaku politik pada masa itu, yang tercermin dari kemenangan PNI dan PKI yang berbasis *nasionalis-sekuler*.²⁰

Analisis Geertz walaupun telah banyak dikritik tetapi masih sering dirujuk ketika menganalisa politik Indonesia. Yang penting dari uraian di atas adalah bahwa perilaku politik masyarakat Indonesia, ternyata untuk sebahagian masih dipengaruhi faktor-faktor *sosiologis-kultural*. Hal ini ditegaskan pula oleh Riswanda Imawan yang menyatakan bahwa norma kelompok menentukan norma dan tingkah laku individu.²¹ Pendekatan ini, menurut Dennis Kavanagh, *links the*

¹⁹ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (London: The Free Press, 1960).

²⁰ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1999)

²¹ Riswanda Imawan, *Op. Cit.*

*individual with the social structure, placing the vote in a social context.*²²

Dengan kata lain, perilaku politik seseorang diasumsikan sebagai lampiran belaka dari asal-usul sosial seseorang. Kecenderungan inilah yang membuat David Denver menamakan paradigma ini sebagai pendekatan determinisme sosial (*social determinism approach*).²³

Mashab Michigan (Pendekatan Psikologis)

Mashab Michigan menggarisbawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi. Menurut Greenstein, seperti dikutip Asfar,²⁴ sikap memiliki tiga fungsi. *Pertama* fungsi kepentingan, bahwa penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, fungsi penyesuaian diri, bahwa seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. *Ketiga*, fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, bahwa upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang

²² Dennis Kavanagh, *Op. Cit.*

²³ Denver dalam Mohammad Asfar, *Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Politik*, dalam *Jurnal Ilmu Politik* 16 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 48

²⁴ Asfar, M. *Ibid.*

mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi.

Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak seorang calon pemilih masih berusia dini. Pada usia dini, seorang calon pemilih telah menerima "pengaruh" politik dari orang tuanya, baik dari komunikasi langsung maupun dari pandangan politik yang diekspresikan orang tuanya. Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok acuan seperti pekerjaan, kelompok pengajian, dan sebagainya. Proses panjang sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Ikatan seperti inilah yang disebut sebagai identifikasi partai. Denver menegaskan bahwa pilihan seseorang harus dipahami sebagai pernyataan loyalitas (identifikasi partai) yang dibentuk oleh pengalaman (sosialisasi) sepanjang hidup.²⁵ Dengan demikian kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah inti dari mashab psikologis untuk menjelaskan perilaku seseorang dalam pemilu.²⁶

²⁵ Denver dalam Muhammad Asfar, *Ibid.*, hlm 50

²⁶ Adnan Nursal, *Op.Cit*, hlm. 59.

Pendekatan Rasional

Pada Kenyataannya, sebagai pemilih mengubah pilihan politiknya dari suatu pemilu ke pemilu lainnya. Peristiwa-peristiwa politik tertentu bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Komunikasi politik, dengan substansi dan strategi yang tepat mungkin saja mempengaruhi pilihan seseorang. Perubahan ini, meskipun harus melalui usaha yang keras, bukanlah hal yang mustahil. Dengan kata lain, perilaku pemilih bukan hanya ditentukan oleh faktor karakteristik sosial dan identifikasi partai.

Pendekatan pilihan rasional (*rasional choice approach*) mengandalkan adanya analogi antara pasar (ekonomi) dengan perilaku pemilih (politik). Hugh Ward dalam tulisannya yang berjudul *Rational Choice Theory* menyatakan bahwa *the mainstream varian of rational choice assumes that individuals all have the rational capacity, time and emotional detachment necessary to choose a best course of action, no matter how complex the choice.*²⁷ Pendekatan di atas tidak berbeda jauh dengan Asfar ketika mengelaborasi pendekatan ini. Ia menyatakan bahwa:

²⁷ Hugh Ward, *Rational Choice Theory*, dalam David Marsh dan Gerry Stoker, *Theory and Methods in Political Science* (Ed) (New York: ST Martin Press INC), hlm 79

Apabila secara ekonomi anggota masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka perilaku politik anggota masyarakat pun akan dapat bertindak rasional pula, yakni memberi suara ke OPP yang dianggap dapat mendatangkan keuntungan dan kemashlahatan dan menekan kerugian atau kemudharatan yang sedikit mungkin. Secara demikian, perilaku pemilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan (*maximum gained*) atau yang mendapatkan kerugian yang paling sedikit; tetapi juga dalam arti memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil (*least risk*), yang penting mendahulukan selamat.²⁸

Pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah – dari partai yang berkuasa kelak – dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa memperdulikan label partai.²⁹

Ketertarikan para pemilih terhadap isu-isu tertentu dan kandidat tertentu yang ditawarkan oleh partai politik bersifat

²⁸ Mohammad Asfar, *Op.Cit*, hlm. 52.

²⁹ *Ibid*, hlm. 62-64

situasional. Dengan sendirinya, daya tarik isu dan kandidat tersebut tidaklah selalu permanen, melainkan berubah-ubah. Pengaruh isu dan kandidat itu antara lain berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilu bersangkutan terutama peristiwa dramatis. Sementara itu, pendekatan rasional terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan, informasi, prestasi, dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan seperti organisasi, kesenian, olah raga, dan politik.

Dampak peristiwa tertentu, pengaruh isu-isu, dan kandidat yang ditawarkan terhadap perubahan situasional perilaku pemilih membuat beberapa pakar melirik model perilaku konsumen produk bisnis sebagai salah satu pendekatan untuk memahami perilaku pemilih. Bahwa perilaku pemilih, menurut Him Melweit, merupakan pengambilan keputusan cepat dan bahwa pengambilan keputusan itu tergantung pada situasi sosial-politik tertentu yang tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lainnya.

Pendekatan rasional mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan "penilaian" yang valid terhadap tawaran partai/kandidat. Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan

mereka bukanlah karena faktor kebetulan dan kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis.³⁰

Adapun ciri-ciri pemberi suara rasional itu meliputi lima. *Pertama*, dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif. *Kedua*, dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain. *Ketiga*, menyusun alternatif dengan cara transitif: jika A lebih disukai daripada B, dan B lebih baik daripada C, maka A lebih disukai daripada C. *Keempat*, memilih alternatif yang tingkat prestasinya lebih tinggi. *Kelima*, selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif yang sama.

³⁰ *Ibid*, hlm. 64-69.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,³¹ yang mengandalkan konstruksi logika dan penggalian interpretatif berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi atau bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dan masalah studi ini. Pendekatan penelitian kualitatif umumnya meletakkan peneliti pada pandangan fenomenologis di mana peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan keterkaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu.³²

Dalam kaitan itu digunakan juga studi kasus sebagai *research strategy*, sebagaimana dijelaskan oleh Nazir bahwa studi kasus adalah penelitian yang berkenaan dengan suatu periode tertentu atau khas dari keseluruhan personalitas. Umumnya peneliti ingin mempelajari latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit yang menjadi subjek.³³ Menurut Denzin Guba studi kasus adalah suatu pendekatan

³¹ Albert Wijaya dalam Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990, hal 66.

³² Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hal 9.

³³ Mon. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal 66.

untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus.³⁴

B. Sumber Data.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data lapangan (data primer) dan data tertulis (data sekunder).

- (1) Data lapangan, yakni data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, melalui kuesioner dan wawancara. Wawancara akan dilakukan Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan jumlah sampel yang akan ditentukan.
- (2) Data tertulis/dokumentasi, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi dan media cetak,

C. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam rangka pengumpulan data digunakan teknik observasi, penyebaran kuesioner dan wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pengurus PPP sebagai partai Pemenang dan KPUD Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan koesioner disebarkan kepada masyarakat Tasikmalaya sebagai pemilih. Dalam menyebarkan koesioner

³⁴ Agus salim (Penyunting), *Teori dan Paradigma sosial dari Denzin Guba dan penerapannya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001, hal 43.

menggunakan tehnik stratifikasi kluster sampling, dimana terlebih dahulu ditentukan kelas-kelas dan stratifikas dalam sampling, yakni:

1. Menentukan jumlah sample yakni sebanyak 50 responden.
2. Penentuan sampling dengan menggunakan rumus yamane, yakni; $n=N/(1+N*e^2)$ dengan N adalah ukuran populasi dan e adalah margin error sebesar 3%.
3. Penetapan sebaran sampling, dengan terlebih dahulu menetapkan kluster-klastinya yakni;
 - a. Sampling dibagi pada tiga 3 kecamatan kemudian ditetapkan 1 desa perkecamatan kemudian ditetapkan 9 TPS sampling.
 - b. TPS-TPS yang menjadi sampling distratifikasi yakni TPS yang memperoleh suara terbanyak dan TPS yang tidak mendapatkan suara/sedikit.
 - c. Koesioner disebarakan kepada konstituen yang berada di TPS-TPS tersebut. Penyebaran koesioner dilakukan dengan random sampling.

D. Analisis data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan melalui multi level analisis (*multi level analysis*) dan analisis historis-holistik. Hal ini didasarkan

atas tiga pertimbangan utama. *Pertama*, metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan gejala yang kompleks. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁵

Analisis terhadap data kualitatif merupakan sumber data yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Penggunaan data kualitatif diharapkan dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.³⁶

³⁵ Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hal 4.

³⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 1992, hal 1-2. Lihat juga uraian secara rinci dan jelas tentang berbagai paradigma ilmu pengetahuan, pendekatan penelitian dan perbandingan model analisis kualitatif dan kuantitatif dalam Dedy Nur Hidayat, *Metode Penelitian Kualitatif* (kumpulan Bahan kuliah), Jakarta: PPS UI, 2003.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak di antara 7°02' dan 7°50' Lintang Selatan serta 109°97' dan 108°25' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kota Tasikmalaya dan Kab. Ciamis.
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia.
- Sebelah Barat : Kabupaten Garut.
- Sebelah Timur : Kabupaten Ciamis.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0-2.500 m di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar bentuk wilayah adalah bergelombang sampai berbukit, kecuali di kecamatan-kecamatan bagian Utara yang berbukit sampai bergunung. Kecamatan Leuwisari, Cigalontang, Sukaratu, Kadipaten, Pagerageung, dan Taraju merupakan kecamatan yang mempunyai ketinggian wilayah 1.000 diatas permukaan air laut (dpl). Kecamatan Cipatujah, Cikalong, dan Karangnunggal merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0-100 m di atas permukaan air laut (dpl).

Kondisi kemiringan lereng berturut-turut adalah: Sangat Curam (>40%) sebesar 33,39% dari luas Kabupaten Tasikmalaya, Agak Curam (15%-25%) sebesar 24,54%, Curam (25%-40%) sebesar 20,54%, Landai (8%-15%) sebesar 14,36%, dan Datar (0%-8%) sebesar 7,17% dari luas Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa sebagian besar bentang alam Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan bumi yang agak curam sampai dengan curam, yaitu sebesar 78,47%. Kondisi ini kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah. Kemiringan lahan yang menunjang untuk pengembangan permukiman hanya sebesar 21,53% dari total luas kabupaten, luasan tersebut umumnya terdistribusi di sekitar kota-kota kecamatan.

Kondisi iklim bahwan temperatur Kabupaten Tasikmalaya pada daerah dataran rendah adalah 34°C dengan kelembaban 50%. Sedangkan pada daerah dataran tinggi mempunyai temperatur 18°-22°C dengan kelembaban berkisar antara 61%-73%.

Curah hujan rata-rata per tahun 2.171,95 mm dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November, dengan musim hujan terjadi antara bulan Oktober dan musim kemarau terjadi antara bulan Juni-September.

- a. Wilayah dengan curah hujan antara 2500-3000 mm/tahun meliputi Kecamatan Sukaraja, Cibalong, Salopa, Pagerageung, Ciawi, dan Jamanis.
- b. Wilayah dengan curah hujan antara 3000-3500 mm/thn meliputi: Kecamatan Cipatujah, Bantarkalong, Karangnunggal, Salopa, Sodonghilir, Cineam, dan Manonjaya.
- c. Wilayah dengan curah hujan 3500-4000 mm/thn meliputi Bojonggambir, Sodonghilir, Singaparna, Cisayong, Rajapolah, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, sebagian Pagerageung.
- d. Wilayah dengan curah hujan diatas 4000 mm/thn adalah Kecamatan Taraju, Salawu, Cigalontang, Leuwisari, dan Cisayong.

2. Kondisi Administratif

Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 Kecamatan dan 351 desa. Kecamatan Cipatujah merupakan kecamatan terluas, yaitu dengan 246,67 Km² atau 8,82% dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kecamatan Sukaresik adalah kecamatan dengan luas wilayah paling kecil, yaitu 17,81 Km² atau 0,61% dari luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Peta 2.2. menggambarkan Peta Administrasi Kabupaten Tasikmalaya

dan cakupan wilayah kajian Buku Putih Sanitasi, meliputi semua wilayah administratif di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.2. akan menjelaskan nama kecamatan, luas wilayah, jumlah desa dan penduduk perkecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 1
Luas Wilayah, Jumlah Desa, dan Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	%	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	Bantarkalong	59,83	2,39	8	34.588
2	Bojongasih	38,58	1,84	6	19.369
3	Bojonggambir	169,2 9	4,92	10	38.724
4	Ciawi	45,31	1,72	11	58.169
5	Cibalong	58,58	2,28	6	30.788
6	Cigalontang	119,7 4	5,23	16	68.345
7	Cikalong	139,6 6	5,92	13	61.793
8	Cikatomas	132,6 8	5,34	9	48.207
9	Cineam	78,79	2,66	10	33.621
10	Cipatujah	246,6 7	8,82	15	63.487
11	Cisayong	59,40	1,87	13	53.256
12	Culamega	68,32	3,19	5	23.142
13	Gunungtanjung	36,31	1,76	7	27.843
14	Jamanis	21,28	0,65	8	32.574
15	Jatiwaras	73,37	3,24	11	48.305
16	Kadipaten	45,79	1,59	6	33.089

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	%	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
17	Karangjaya	47,90	1,78	4	12.498
18	Karangnunggal	136,33	5,68	14	81.744
19	Leuwisari	53,26	1,11	7	36.857
20	Mangunreja	29,64	1,04	6	37.125
21	Manonjaya	39,41	1,58	12	60.856
22	Padakembang	37,70	0,74	5	35.936
23	Pagerageung	66,74	2,34	10	51.735
24	Pancatengah	201,85	5,93	11	45.064
25	Parungponteng	47,27	1,87	8	33.807
26	Puspahiang	34,89	2,12	8	33.002
27	Rajapolah	21,45	0,56	8	44.924
28	Salawu	50,49	2,73	12	58.099
29	Salopa	121,76	3,93	9	48.819
30	Sariwangi	49,66	1,48	8	30.612
31	Singaparna	24,82	0,72	10	66.235
32	Sodonghilir	93,11	3,59	12	63.206
33	Sukahening	28,42	1,09	7	29.667
34	Sukaraja	43,08	1,75	8	49.28
35	Sukarame	19,92	0,61	6	39.346
36	Sukaratu	57,14	1,58	8	44.314
37	Sukaresik	17,81	0,61	8	33.516
38	Tanjungjaya	36,69	1,37	7	42.759
39	Taraju	55,85	2,37	9	37.731
Jumlah		2.708,82	100,00	351	1.692.432

Sumber : Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2012 (Diolah)

3.Kondisi Demografi

Data kependudukan, secara umum berkaitan dengan kepentingan penyusunan perencanaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta rencana intervensi program dalam berbagai sektor seperti perencanaan, termasuk dalam perencanaan bidang sanitasi.

a. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya selama 3 tahun terakhir mencapai 1,00%, dari 1.675.544 jiwa pada tahun 2010 menjadi 1.692.432 jiwa pada tahun 2011, dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2012 adalah sebesar 1,4%. Selengkapnya jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya menurut jenis kelamin disajikan sebagai berikut :

Tabel 2
Penduduk Berdasar Jenis Kelamin

Tahun	Jumlah Penduduk		Total	Sex Ratio	LPP
	Laki-laki	Perempuan			
2010	835.052	840.492	1.675.544	99,35	0,88
2011	843.346	849.086	1.692.432	99,32	1,00
2012	855.179	860.999	1.716.178	99,32	1,40

Sumber : LKPJ Kabupaten Tasikmalaya 2012 (diolah)

Rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya masih lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan penduduk Propinsi Jawa Barat dalam periode waktu yang

sama. Sejalan dengan percepatan pembangunan ibukota diperkirakan pertumbuhan penduduk lebih meningkat, sehubungan pertumbuhan kawasan perkotaan yang menjadi daya tarik terjadinya urbanisasi.

b. Persebaran, Kepadatan dan Proyeksi

Kepadatan penduduk Kabupaten Tasikmalaya selama tiga tahun terakhir adalah 637 orang per Km² pada tahun 2009, 618 orang per Km² pada tahun 2010, dan 625 orang per Km² pada tahun 2009. Kepadatan penduduk setiap kecamatan tidak merata. Konsentrasi penduduk terdapat pada kecamatan-kecamatan dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya bagian Utara. Kecamatan Singaparna merupakan kecamatan terpadat dengan rata-rata 2.669 jiwa setiap kilometer persegi. Sedangkan kecamatan yang tidak padat adalah Kecamatan Pancatengah dengan rata-rata hanya 224 penduduk untuk setiap kilometer persegi.

Jumlah dan kepadatan penduduk saat ini serta proyeksinya untuk lima tahun selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3. dan 2.4. Rumus yang digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk adalah: $\rho_t = \rho_0 \times (1+r)^n$ dimana

- ρ_n = Jumlah penduduk pada tahun ke n
 ρ_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar
 r = Laju pertumbuhan penduduk (%)
 n = Jumlah interval

4. Kondisi Keuangan dan Perekonomian Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggung jawaban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya adalah rencana keuangan, baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya guna melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

APBD Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan, dan hasil identifikasi aspirasi masyarakat lainnya yang disampaikan melalui perangkat Pemerintah maupun DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Realisasi belanja sanitasi yang meliputi pembiayaan untuk komponen pengelolaan air limbah, persampahan, drainase lingkungan, serta promosi higiene dan sanitasi dalam APBD Kabupaten Tasikmalaya masih sangat minim. Prosentase dari belanja langsung APBD, belanja sanitasi hanya mendapatkan porsi 0,001% pada tahun 2008 dan 2009, meningkat jadi 0,002% pada tahun 2010, meningkat lagi menjadi 0,011% pada tahun 2011, dan kembali mengalami penurunan menjadi 0,003% pada tahun 2012.

Terlihat pula bahwa urusan sanitasi masih menjadi urusan sebagian kecil SKPD saja, yaitu Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan, Kantor Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan. Itupun baru pembiayaan untuk investasi,

belum terdapat anggaran belanja untuk operasional dan pemeliharaan pada setiap komponennya.

5. Kondisi Sosial dan Budaya

Data sosial dan budaya yang dimaksud adalah data fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA dan yang setara), jumlah keluarga miskin, dan jumlah rumah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

a. Data Fasilitas Pendidikan

Data fasilitas pendidikan untuk tingkat SD, SMP, SMA dan yang sederajat di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 2.9. Tersebar di hampir semua lokasi kecamatan, fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut.

Tabel: Fasilitas Pendidikan yang Tersedia di Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 3

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Nama Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan						
	Umum				Agama		
	SD	SLTP	SMA	SMK	MI	MTs	MA
01. Cipatujah	50	11	1	1	6	3	-
02. Karangnunggal	57	10	1	4	1	7	-
03. Cikalong	46	10	1	-	11	7	4
04. Pancatengah	32	9	-	1	10	6	1

Nama Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan						
	Umum				Agama		
	SD	SLTP	SMA	SMK	MI	MTs	MA
05. Cikatomas	33	9	1	3	6	7	1
06. Cibalong	27	5	1	4	2	1	-
07. Parungponteng	25	2	-	2	8	9	2
08. Bantarkalong	23	6	1	1	5	4	2
09. Bojongasih	15	4	-	2	3	3	1
10. Culamega	18	5	-	1	2	1	-
11. Bojoggambir	37	7	1	2	2	5	1
12. Sodonghilir	51	9	2	1	11	6	1
13. Taraju	26	5	2	-	3	2	-
14. Salawu	34	7	3	2	9	7	1
15. Puspahiang	23	5	1	-	4	1	-
16. Tanjungjaya	22	5	1	3	6	6	1
17. Sukaraja	29	4	-	2	2	4	1
18. Salopa	29	6	-	-	11	11	5
19. Jatiwaras	38	6	1	2	4	5	1
20. Cineam	21	5	1	2	5	2	1
21. Karangjaya	9	3	-	-	1	1	-
22. Manonjaya	35	7	1	4	9	3	1
23. Gunungtanjung	18	5	2	2	5	1	-
24. Singaparna	31	6	6	5	8	8	6
25. Sukarame	21	6	3	4	2	2	-
26. Mangunreja	18	4	-	1	4	8	5
27. Cigalontang	48	11	1	3	3	7	2
28. Leuwisari	18	4	1	4	4	2	-
29. Sariwangi	17	7	1	3	4	4	2
30. Padakembang	18	5	1	5	6	5	2
31. Sukaratu	21	9	2	2	12	3	1
32. Cisayong	37	5	-	3	2	3	1
33. Sukahening	17	5	-	1	4	1	-
34. Rajapolah	27	4	2	1	1	3	1
35. Jamanis	18	3	-	-	8	3	1

Nama Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan						
	Umum				Agama		
	SD	SLTP	SMA	SMK	MI	MTs	MA
36. Ciawi	31	7	1	4	4	2	4
37. Kadipaten	18	3	-	-	4	1	-
38. Pagerageung	34	6	1	2	9	6	1
39. Sukaresik	20	3	-	-	5	4	-
Jumlah	1,092	233	40	77	206	164	50

Sumber : Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2012 (diolah)

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Peningkatan SDM lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengesampingkan pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berusaha secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui jalur pendidikan. Upaya pemenuhan terhadap peningkatan tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya dengan cara penyediaan fasilitas pendidikan yang tersebar di beberapa kecamatan

b. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk Kabupaten Tasikmalaya menurut Kepala Keluarga adalah sebanyak 423.094 KK. Dari jumlah tersebut

43.845 KK termasuk penduduk miskin, atau sekitar 10% persen dari total penduduk di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Miskin Perkecamatan

Kecamatan	Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Keluarga Miskin (KK)	%
01, Cipatujah	19,008	2,188	0.12
02, Karangnunggal	25,308	2,360	0.09
03, Cicalong	19,869	1,954	0.10
04, Pancatengah	13,372	1,673	0.13
05, Cikatomas	14,608	1,706	0.12
06, Cibalong	9,358	909	0.10
07, Parungponteng	10,370	1,288	0.12
08, Bantarkalong	9,555	859	0.09
09, Bojongasih	6,130	675	0.11
10, Culamega	6,908	888	0.13
11, Bojonggambir	11,629	1,818	0.16
12, Sodonghilir	18,374	2,356	0.13
13, Taraju	10,658	1,230	0.12
14, Salawu	16,647	1,606	0.10
15, Puspahiang	10,249	1,182	0.12
16, Tanjungjaya	11,944	1,575	0.13
17, Sukaraja	13,804	1,793	0.13
18, Salopa	12,949	1,713	0.13
19, Jatiwaras	13,569	1,685	0.12
20, Cineam	11,170	1,125	0.10
21, Karangjaya	4,251	484	0.11
22, Manonjaya	16,272	1,425	0.09
23, Gunungtanjung	7,777	908	0.12
24, Singaparna	16,314	846	0.05
25, Sukarame	9,715	742	0.08
26, Mangunreja	10,171	990	0.10
27, Cigalontang	18,623	2,094	0.11
28, Leuwisari	9,699	765	0.08
29, Sariwangi	7,869	943	0.12

Kecamatan	Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Keluarga Miskin (KK)	%
30, Padakembang	9,383	666	0.07
31, Sukaratu	11,480	800	0.07
32, Cisayong	14,917	1,150	0.08
33, Sukahening	8,404	899	0.11
34, Rajapolah	11,669	898	0.08
35, Jamanis	8,483	967	0.11
36, Ciawi	15,512	1,492	0.10
37, Kadipaten	8,231	861	0.10
38, Pagerageung	14,292	1,274	0.09
39, Sukaresik	8,751	998	0.11
Jumlah	477,292	49,785	0.10

Sumber : LKPJ Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2012 (Diolah)

c. Jumlah Rumah Perkecamatan

Jumlah bangunan rumah di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebanyak 359.809 rumah. Tersebar di 39 lokasi kecamatan, jumlah bangunan rumah perkecamatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini;

Tabel 5.

Jumlah Rumah Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH
1	Manonjaya	12.034
2	Kadipaten	9.768
3	Sukaresik	7.728
4	Ciawi	12.286
5	Pagerageung	10.890
6	Tanjungjaya	9.389
7	Cisayong	11.539

8	Gunungtanjung	2.533
9	Sukarame	7.575
10	Sodonghilir	12.839
11	Sukaratu	8.785
12	Mangunreja	7.879
13	Culamega	7.876
14	Sukahening	6.713
15	Rajapolah	9.258
16	Jamanis	8.113
17	Sukaraja	11.764
18	Jatiwaras	9.569
19	Taraju	7.554
20	Salopa	9.231
21	Cikalong	13.396
22	Puspahiang	7.992
23	Cikatomas	10.054
24	Cineam	8.306
25	Bojonggambir	8.077
26	Salawu	11.727
27	Karangjaya	2.926
28	Bantarkalong	7.880
29	Bojongasih	4.209
30	Karangnunggal	17.311
31	Parungpoteng	8.057
32	Cipatujah	13.040
33	Cibalong	6.460
34	Pancatengah	9.798
35	Sariwangi	6.269
36	Padakembang	7.395
37	Cigalontang	14.995
38	Leuwisari	7.263
39	Singaparna	11.245
	J U M L A H	359.809

Sumber : Tasikmalaya Dalam Angka 2012 (Diolah)

6. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kelembagaan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tasikmalaya diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah. Terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris dan beberapa bidang, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Bagian Pemerintahan, yang membawahi Sub Bagian Pemerintahan Umum, Sub Bagian Pemerintahan Desa, Sub Bagian Pertanahan.

- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi Sub Bagian Bina Pendidikan dan Agama, Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial, Sub Bagian Bina Pemuda, Olahraga dan Peranan Wanita.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat, yang membawahi Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi, Sub Bagian Keprotokolan, Sub Bagian Perpustakaan.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- a. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, yang membawahi Sub Bagian Bina Ekonomi Sumber Daya Alam, Sub Bagian Bina Ekonomi Badan Usaha Milik Daerah dan Pengembangan Jasa, Sub Bagian Penanaman Modal.
 - b. Bagian Bina Program, yang membawahi Sub Bagian Pengendalian Program, Sub Bagian Bina Pembangunan Swadaya Masyarakat, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Ketahanan Pangan, yang membawahi Sub Bagian Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan, Sub Bagian Ketahanan Pangan Masyarakat, Sub Bagian Distribusi dan Pengendalian.

3. Asisten Administrasi Umum

- a. Bagian Organisasi, yang membawahi Sub Bagian Kelembagaan, Sub Bagian Ketatalaksanaan, Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
- b. Bagian Umum, yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Sub Bagian Perlengkapan, Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- c. Bagian Hukum, yang membawahi Sub Bagian Perundang-undangan, Sub Bagian Bantuan Hukum, Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.
- d. Bagian Keuangan, yang membawahi Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Bagian Umum yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan, Sub Bagian Rumah Tangga, Sub Bagian Protokol.
2. Bagian Risalah dan Persidangan, yang membawahi Sub Bagian Risalah, Sub Bagian Persidangan, Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Keuangan, yang membawahi Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Dinas Daerah di Kabupaten Tasikmalaya :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Bina Marga dan Pengairan
6. Dinas Tata Ruang dan Permukiman
7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
9. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
11. Dinas Pertambangan dan Energi
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

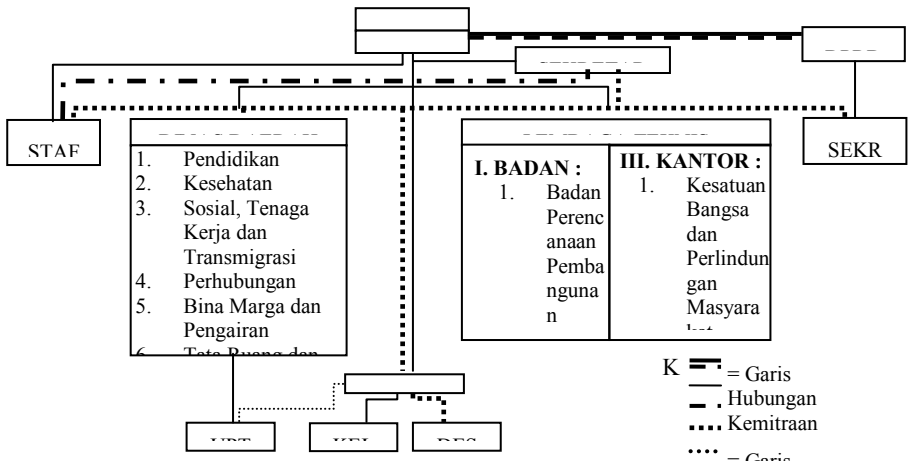
Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Tasikmalaya :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
5. Kantor Penelitian dan Pengembangan
6. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
7. Kantor Lingkungan Hidup

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis serta tugas lain yang diberikan Bupati. Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Informasi dan Pendaftaran, Seksi Data dan Pengolahan Perijinan, Seksi Penerbitan dan Dokumentasi, Tim Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Lampiran I Perda Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Oktober 2008

B. Hasil Penelitian

1. Pilkada dan Pileg DPRD Kab. Tasikmalaya

a. Proses Pilkada.

Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan tanggal 9 Januari 2011 untuk menentukan bupati dan wakil bupati periode 2011-2015. Diikuti oleh delapan (8) pasangan calon. Kedelapan calon tersebut terbagi dua pencalonan yakni empat calon diusung oleh partai politik dan empat calon berangkat dari perseorangan. Kedelapan calon tersebut antara lain;

1. Endang Kusnaeni-Suparman (jalur perseorangan);
2. Subarna-Dede T Widarsih (Partai Golkar);
3. Endang Hidayat-Ahmad Juhana (jalur perseorangan);
4. Ahmad Saleh-Ucu Asep Dani (Partai Demokrat);
5. Harmaen Muchyi-Tachman Iding Husein (jalur perseorangan);
6. Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto (PPP, PDI-P dan PAN);
7. Ade Sumia-Nanang Mamur (jalur perseorangan); dan
8. Endang Hidayat-Asep Ahmad Djaelani (PKB dan PKS).

Ada 8 pasang calon bupati dan wakil bupati yang akan maju pada pemilukada Kabupaten Tasikmalaya pada Januari 2011. kedelapan pasang ini adalah 1. Endang Kusnaeni-

Suparman (perseorangan, 3%) 2. Subarna–Hj. Dede T Widarsih (Golkar, 15%) 3. Endang Hidayat–Ahmad Juhana (perseorangan, 3%) 4. Ahmad Saleh–Ucu Asep Dani (Demokrat dan partai kecil, 15%) 5. H. Hermaen Muhyi–Tatang Iding (perseorangan, 3%) 6. Uu Ruzhanul Ulum– Ade Sugianto (PPP,PDIP, PAN, 41%) 7. Ade Surnia–Nanang Muhtar (perseorangan, 3%) 8. Endang Hidayat–Asep Ahmad Djaelani (PKB, PKS 17%).

Ada 4 Pasangan cabup-cawabup dari perseorangan dan 4 pasangan lainnya dari parpol. Inilah kompetisi tidak langsung dari pertarungan pilkada nanti, mana yang dikehendaki menjadi bupati-wakil bupati oleh pemilih apakah dari perseorangan atau dari parpol? Apakah kemenangan bisa diraih oleh perseorangan, seperti di kabupaten Garut yang menjadi kabupaten tetangga, ataukah eksistensi parpol menjadi pemenangnya? ini menarik untuk kita ketahui hasilnya dalam 2 bulan ke depan.

Mari kita telaah lebih jauh tentang cabup-cawabup Tasikmalaya dari kalangan parpol, nomor urut kedua adalah pasangan cukup kontroversi dan mengundang banyak pertanyaan, Subarna dan Hj. Dede T Widarsih, Subarna merupakan ketua fraksi PPP di DPRD beliau, terpilih dari dapil VI dengan suara terbanyak. Mungkin inilah yang

menjadikan partai Golkar memininang Subarna sebagai cabup dan menempatkan Hj. Dede T Widarsih ketua DPD Golkar menjadi wakilnya. Subarna pun maju untk ikut berkompetisi di pemilukada 2011, walaupun banyak suara sumbang menyertainya, ancaman di PAW bahkan ada ancaman dipecat sebagai anggota PPP, toh itu semua tidak menyurutkan langkah Subarna untuk maju sebagai cabup dari Golkar. Pasangan ini harus bekerja ekstra keras karena keduanya 'hanya' dikenal di dapil 6, yang merupakan basis pemilih keduanya.

Partai Demokrat beserta koalisi partai-partai kecil mengusung pasangan Ahmad Saleh–Ucu Asep Dani. Pasangan ini selalu menghadirkan foto SBY dalam setiap spanduk ataupun baligo yang dipasangnya. Memang fenomena SBY adalah sebuah keuntungan dari pasangan ini, Tentunya berharap popularitas SBY menular kepada pasangan calon ini adalah merupakan hal yang wajar, tapi ini tidak bisa diandalkan terus-menerus.. Karena terbukti dari banyak pemilukada yang telah terlaksana fenomena SBY tidak terlalu menjual, bahkan di 15 pemilukada Propinsi Jawa Timur yang diikuti oleh calon dari partai demokrat sebagai pemenang legislatif di kabupaten/kota tersebut 93,33% mereka mengalami kekalahan. Bisa kita dikatakan bahwa mereka hanya menang di satu kabupaten, itupun partai demokrat tidak mencalonkan

sendiri, melainkan berkoalisi dengan partai lain. Tentunya tidak mudah bagi pasangan ini untuk memenangkan pilukada 2011.

Pasangan berikutnya adalah Uu Ruzhanul Ulum–Ade Sugianto, pasangan ini didukung oleh PPP, PDIP dan PAN yang mendapatkan 24 kursi atau sekitar 48% suara di DPRD. Pasangan inilah yang mempunyai modal politik terbesar, awal yang tidak dimiliki pasangan lainnya, namun jika terlena sedikit suara tersebut akan direbut calon lainnya, bukankah strategi Golkar dengan menempatkan Subarna sebagai cabupnya merupakan bukti nyata bahwa mereka siap menampung suara PPP yang tidak solid. Berdasarkan data pelaksanaan pilukada 2010 sampai saat ini, sebanyak 108 yang kami amati bahwa pemenang legislatif tidak otomatis bisa dengan mudah memenangkan pilukada, bahkan dari 108 sekitar 69,4% pilukada dimenangkan oleh partai yang kalah saat pemilu legislatif 2009. Tentunya melihat data tersebut bukan mustahil pasangan Uu Ruzhanul Ulum–Ade Sugianto akan bisa dikalahkan oleh pasangan lainnya seandainya mereka terlena dan merasa percaya diri yang berlebihan ”over confident”.

Berikutnya adalah Endang Hidayat–Asep Ahmad Djaelani yang didukung oleh PKB dan PKS. Pasangan ini

mempunyai keuntungan yaitu mereka lebih dikenal oleh masyarakat sebagai birokrat, dimana keduanya pernah bekerjasama saat menjadi wakil bupati dan sekda, berkah inilah yang menjadikan pasangan ini banyak diunggulkan oleh pengamat akan menjadi pemenangnya. Namun menyimak kondisi di lapangan dengan demografi masyarakat dan kuatnya pemilih tradisional, tentu tidak akan mudah untuk pasangan ini memenangkan pemilukada.

Berikutnya adalah pasangan-pasangan perseorangan atau independent. Jikalau hitungan modal awal yang hanya 3% suara pemilih, memang menjadikan pasangan perseorangan kuda hitam di setiap ajang pemilukada. Namun tidak perlu berkecil hati karena terpilihnya Ceng Fikri dan Dicky Chandra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut diharapkan bisa 'menular' ke Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan tetangga dekatnya.

Yang tidak kalah menariknya untuk kita simak dan amati adalah kemana arah politik Bupati Tatang Farhanul Hakim, setelah beliau tidak bisa mencalonkan siri lagi. Peran bupati incumbent begitu besar dalam proses suatu kemenangan pemilukada, contohnya tidak perlu jauh-jauh yaitu di Kabupaten Indramayu dan kabupaten Bandung, bagaimana kemenangan Hj. Anna Sophanah – H Supendi bisa menang

telak, karena didukung penuh oleh Bupati H Irianto MS Syaifuddin. Begitupun Dadang Nasser – Deden R Rumaji yang secara langsung didukung oleh Bupati Obar Sobarna. Selain karena kedekatan emosional tentunya ideologi yang sama sehingga bupati-bupati incumbent mau mendukungnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi pertanyaannya siapakah calon bupati dan calon wakil bupati Tasikmalaya yang merupakan ”putra mahkota” dan akan mendapatkan dukungan Bupati Tatang Farhanul Hakim

Berdasar penghitungan suara tersebut, pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto terpilih dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif Kabupaten Tasikmalaya – dan dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 03/Kpts/KPU-11.329078/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011 pada tanggal 15 Januari 2011.

1. Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto (PPP, PDI-P dan PAN) : 263.099 suara (32,25%)
2. Endang Kusnaeni-Suparman : 15.530 suara (1,90%)
3. Subarna-Dede T Widarsih (Partai Golkar) : 171.873 suara (21,07%)

4. Endang Hidayat-Ahmad Juhana: 27.802 suara (3,41%)
5. Ahmad Saleh-Ucu Asep Dani: 60.051 suara (7,36 %)
6. Harmaen Muchyi-Tachman Iding Husein: 13.319 suara (1,63 %)
7. Ade Sumia-Nanang Ma'mur: 42.596 suara (5,22 %)
8. Endang Hidayat-Asep Ahmad Djaelani: 221.554 suara (27,16 %)

Jumlah warga yang menggunakan hak pilih mencapai 844.033, sedangkan suara tidak sah 28.209 dan suara sah 815.824 atau 96,66 persen. Dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 66,02%.

Proses pilkada tak lepas dari gugatan atas proses pemilu, akan tetapi Majelis panel Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai M Akil Mochtar menggelar sidang perdana sengketa Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (1/2). Pemohonnya adalah tiga pasangan calon yakni E Hidayat-Asep A Djaelani (8), HR Harmaen Muchhyi Wiratanuningrat-Tachman Iding Husein (5), dan Subarna-Dede T Widarsih (2).

Mereka mempersoalkan netralitas pelaksanaan Pemilukada Tasikmalaya yang digelar 9 Januari lalu itu. Pemilukada itu dinilai banyak kecurangan di antaranya ketidaknetralan KPUD Tasikmalaya terhadap pasangan

tertentu, adanya keterlibatan birokrasi, keterlibatan mantan Bupati, soal DPT, dan pemilih di bawah umur.

Sesuai hasil keputusan KPUD Tasikmalaya No 03/Kpts/KPU-11.329078/2011, pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto (6) ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan perolehan suara 263.099 (32,25 persen). Ruzhanul-Sugianto yang diusung oleh tiga partai besar yakni PPP, PDIP, dan PAN, menyingkirkan tujuh pasangan lainnya.

Kuasa hukum pemohon, Hikmat Prihadi menuding penyelenggaraan Pemilukada Tasikmalaya 2011 berlangsung tidak jujur dan adil dengan ditandai sejumlah kecurangan yang bersifat struktur, sistematis, dan masif. “Ada bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan antara yang satu dengan lainnya terkait ketidakprofesionalan KPUD,” kata Hikmat.

Hikmat menyatakan bahwa saat penyelenggaraan Pemilukada Tasikmalaya banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Selain itu, banyak pendukung para pemohon tidak mendapatkan undangan yang tersebar di 39 kecamatan, sehingga tak dapat menggunakan hak pilihnya.

Ia menuding mantan Bupati Tasikmalaya periode 2006-2011 Tatang Farhanulhakim telah berpihak kepada pasangan nomor urut 6. Caranya, mengirimkan 100.000 kartu pos kepada

penerima BLT, pengurus RT/RW, aparat desa se-kabupaten Tasikmalaya untuk meminta dukungannya disertai alat peraga/gambar pasangan nomor urut 6.

Hal itu diperparah dengan adanya keterlibatan PNS dan birokrasi untuk memenangkan pasangan nomor urut 6. Salah satu contohnya, pada 8 Januari seorang Camat Ciawi memberikan uang kepada warga kampung Tanjung Desa Pamoyanan agar memenangkan pasangan nomor urut 6. Hal ini dinilai melanggar Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 yang melarang pasangan calon melibatkan PNS dan birokrasi.

Soal politik uang, lanjutnya, tim sukses pasangan nomor urut 6 telah membagi-bagikan uang kepada pemilih. Misalnya, tim sukses telah membagi-bagikan uang sebesar Rp25 ribu per orang saat nonton bareng pertandingan Tim Nasional di SMK I Kecamatan Pascateengah yang dihadiri para kepala desa. “Pada 7 Januari 2011 juga, pasangan nomor urut 6 membagikan uang sebesar Rp40 ribu dan baju koko kepada para alim ulama sekecamatan Puspahiang,” ungkapnya.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPUD Tasikmalaya No 02/Kpts/KPU-11.329078/2011 dan No 03/Kpts/KPU-11.329078/2011 yang menetapkan pasangan Ruzhanul-

Sugianto sebagai pasangan terpilih periode 2011-2016. “Memerintahkan KPUD Tasikmalaya melakukan pemungutan suara ulang di Tasikmalaya,” kata Hikmat.

Sementara kuasa hukum KPUD Tasikmalaya Absar Kartadibrata membantah semua dalil yang dikemukakan pemohon. Menurutnya, persoalan DPT terjadi dimana-mana, tidak hanya di Tasikmalaya. “Demikian pula tidak jelas pemilih daerah mana dan berapa jumlahnya yang tidak dapat lembar C-6,” kata Absar.

Ia mengakui bahwa memang ada pemilih yang baru berusia 15 tahun. Namun, pemilih itu tercatat sudah menikah. Sebab, berdasarkan aturan meski pemilih di bawah umur dan sudah menikah dapat menggunakan hak pilihnya. “Pemilih ganda juga sebenarnya tidak ada karena nama dan nomor juga lain,” katanya.

Selain itu, ia juga membantah tudingan adanya persyaratan pasangan nomor urut 6 yang cacat hukum. “Syarat baik itu dari kepolisian atau pengadilan, itu sudah memenuhi syarat, nanti akan kita buktikan,” ujarnya. Karenanya, pihaknya tidak melihat adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

b. Proses Pileg DPRD

Pemilihan anggota legislatif tahun 2014 diikuti oleh partai politik. Partai politik yang berkompetisi sebanyak 12 partai di Kabupaten Tasikmalaya. Partai peserta pemilu tersebut antara lain:

1. Partai Nasdem
2. Partai Kebangkitan Bangsa
3. Partai Keadilan Sejahtera
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5. Partai Golongan Karya
6. Partai Gerakan Indonesia Raya
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional
9. Partai Persatuan Pembangunan
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Bulan Bintang
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Kabupaten Tasuikmalaya yang terdiri dari 38 Kecamatan dibagi kepada 7 daerah pemilihan (Dapil), dimana setiap dapil dilihat dari jumlah penduduknya, sehingga setiap Dapil ada yang berjumlah 5 sampai 6 kecamatan. Kabupaten

Tasikmalaya terdiri dari 351 Desa, kemudian terbagi kepada 4.489 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan jumlah pemilih sebanyak 1.378.163 pemilih, yang terdiri dari 693.111 suara berjenis kelamin laki-laki dan 685.052 suara berjenis kelamin perempuan.

Adapun kursi DPRD yang diperebutkan sebanyak 50 kursi yang terbagi kepada 7 Dapil. Dapil 1 terdiri dari 6 kecamatan memperebutkan 8 kursi DPRD. Dapil 2 terdiri dari 6 kecamatan memperebutkan 8 kursi DPRD. Dapil 3 terdiri dari 5 kecamatan memperebutkan 7 kursi DPRD. Dapil 4 terdiri dari 6 kecamatan memperebutkan 7 kursi DPRD. Dapil 5 terdiri dari 4 kecamatan memperebutkan 7 kursi DPRD. Dapil 6 terdiri dari 7 kecamatan memperebutkan 7 kursi DPRD dan dapil 7 terdiri dari 5 kecamatan memperebutkan 6 kursi DPRD.

Grafik rekapitulasi jumlah perolehan suara sah partai politik dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014.

Grafik 1
Rekapitulasi Suara Partai Pileg 2014

No	Partai	Suara Sah	%
1	NasDem	33.070	3,50%
2	PKB	128.226	13,55%
3	PKS	64.635	6,83%
4	PDIP	140.068	14,80%
5	Golkar	123.345	13,04%
6	Gerindra	80.529	8,51%
7	Demokrat	70.761	7,48%
8	PAN	84.233	8,90%
9	PPP	189.042	19,98%
10	Hanura	17.538	1,85%
14	PBB	10.879	1,15%
15	PKPI	3.826	0,40%
	Total	946.152	

Grafik rekapitulasi perolehan kursi partai politik dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014.

Grafik 2

Perolehan Kursi Partai Politik Pada Pileg 2014

No	PARTAI	Jumlah Kursi	%
1	NasDem	-	0,00%
2	PKB	8	16,00%
3	PKS	2	4,00%
4	PDIP	8	16,00%
5	Golkar	7	14,00%
6	Gerindra	4	8,00%
7	Demokrat	6	12,00%
8	PAN	6	12,00%
9	PPP	9	18,00%
10	Hanura	-	0,00%
14	PBB	-	0,00%
15	PKPI	-	0,00%
	Total	50	

2. Karakteristik Responden dan Perilaku Pemilih

Penjelasan-penjelasan di bawah ini didasarkan atas penelitian terhadap lima puluh orang responden yang merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih baik pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati tahun 2011 maupun pada pemilu legislatif tahun 2014. Proporsi responden yang diwawancarai terdiri dari 25 orang (50%) laki-laki dan 25 orang (25%) perempuan.

a. Usia.

Dalam penelitian ini usia responden dibagi menjadi enam interval, yaitu 17-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun, 56-65 tahun, dan di atas 65 tahun. Variabel umur ini akan digunakan sebagai salah satu variabel untuk melakukan cross check dengan variabel pilihan responden pada pemilu pada tahun 2011 dan pemilihan legislatif anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014. Komposisi usia responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6
Usia Responden

Usia	Jumlah	%
17-25 tahun	8	16
26-35 tahun	12	24
36-45 tahun	15	30
46-55 tahun	5	10
56-65 tahun	8	16
➤ 65 tahun	2	4
Jumlah	50	100

Dari tabel 1 di atas tampak bahwa persentase terbesar adalah responden yang berada pada interval ketiga dan kedua atau yang berumur 36-45 tahun (30%) dan 26-35 tahun (24%). Sedangkan persentase terkecil adalah responden yang berada pada interval keenam atau yang berumur lebih dari 65 tahun (4%). Proporsi ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih tergolong dalam usia yang produktif.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden digolongkan sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang pernah mereka ikuti. Jenjang pendidikan formal diklasifikasi ke dalam tiga kategori,

yaitu pendidikan rendah (SD/SLTP?Sederajat), pendidikan menengah (SMU/Sederajat), dan pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana).

Tingkat pendidikan responden ini akan digunakan sebagai variabel untuk melakukan cross check dengan variabel pilihan responden pada pemilukada 2011 dan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014. Komposisi tingkat pendidikan responden dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 7
Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Rendah	9	18
Menengah	29	58
Tinggi	12	24
Jumlah	50	100

Pendidikan responden berdasarkan data yang ditunjukkan dalam tabel 2 di atas ternyata sebagian besar berada pada tingkat menengah atau SLTA?Sederajat, dengan jumlah persentase 58 persen. Selain itu terdapat 24 persen responden yang saat ini telah berhasil menyelesaikan pendidikannya

sampai ke tingkat perguruan tinggi. Sedangkan sisanya (18%) merupakan responden yang berpendidikan rendah atau hanya sampai pada taraf SD atau SLTP/ sederajat.

Pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya seperti yang diakui Udin Saefuddin, pada umumnya memang belum mencapai tingkat yang tinggi. Kalaupun ada beberapa yang sudah memperoleh gelar kesarjanaan ataupun diploma, mereka itu adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini masih berusia muda. Sedangkan untuk masyarakat yang berusia di atas 40 tahun sebagian besar berpendidikan hanya sampai pada tingkat SLTA saja.

c. Pekerjaan

Pekerjaan responden dibagi ke dalam 8 kategori, yaitu pegawai negeri sipil (PNS), pedagang, petani, dan termasuk juga kategori tidak bekerja. Komposisi pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8
Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
PNS	1	2
Karyawan Swasta	2	4
Pedagang	10	20
petani	24	48
Guru Non PNS	4	8
Tidak bekeerja	9	18
Jumlah	50	100

d. Sosialisasi politik Responden

Sosialisasi Politik responden akan dilihat dari konsumsi media massa, Media massa merupakan salah satu sumber informasi dan komunikasi politik masyarakat yang sangat penting. Masyarakat dapat mengetahui perkembangan sosial-politik baik pada tingkat nasional maupun lokal salah satu sumber penting adalah media massa. Hal ini disebabkan jangkauannya yang sangat luas dan sifatnya yang selalu memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat. Media

massa di maksud dapat berbentuk media cetak maupun media elektronik.

Pada tabel berikut media massa dibagi ke dalam lima kategori yang secara garis besar terdiri dari media massa lokal dan media massa nasional. Komposisi media massa yang dikonsumsi responden dapat dilihat dalam tabel 4 di bawah ini.

Tabel 9

Konsumsi Media Massa Responden

Media Massa	Konsumsi	
	Ya	Tidak
Koran Regional	6 (12%)	44 (88%)
Koran Lokal	35 (70%)	15 (30%)
Koran Nasional	2 (4%)	48 (96%)
Radio	6 (12%)	44 (885)
Televisi	50 (100%)	0

Dari tabel 9 di atas kita dapat melihat bahwa pada umumnya responden memanfaatkan media massa, dalam hal ini koran lokal dan televisi, sebagai sumber informasi dan hiburan mereka. Untuk media massa jenis koran, hanya 70 persen responden yang menyatakan bahwa mereka mengkonsumsi koran lokal, seperti koran Tribun dan Radar, sedangkan selebihnya 12 persen mengkonsumsi koran regional seperti koran Pikiran Rakyat dan hanya 4 persen

mengonsumsi koran nasional seperti Republika dan Media Indonesia.

Untuk media massa radio, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang gemar mendengarkan radio, baik sebagai sumber informasi maupun hiburan. Hanya empat persen responden yang selama ini gemar mendengarkan radio lokal dan 12 persen responden yang gemar mendengarkan radio nasional. Sedangkan siaran radio yang didengar oleh responden pada umumnya adalah siaran-siaran radio yang sifatnya menghibur, seperti antasalam FM, bukan radio-radio yang lebih menonjolkan sisi pemberitaan politik.

Hal berbeda terlihat pada aktivitas menonton televisi responden. Ternyata semua responden (100%) merupakan konsumsi dari media massa televisi. Tentu saja ini bukan sesuatu yang istimewa mengingat kondisi yang sama juga dapat kita jumpai di hampir semua wilayah di Indonesia, terutama di daerah perkotaan.

e. Keterkaitan Responden dengan Organisasi Sosial dan Politik

Keterlibatan responden atau anggota keluarga responden dengan salah satu organisasi sosial atau organisasi partai

politik, tertentu saja secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pilihan-pilihan politik responden. Hal ini disebabkan keterlibatan responden atau anggota keluarga merupakan agen sosialisasi politik, disamping sekolah dan peer groups, yang penting bagi setiap orang. Bahkan Hyman, seperti yang dikutip Mohtar Mas' oed dalam bukunya “Perbandingan Sistem Politik”, berpendapat bahwa keluarga, khususnya orang tua, sangat berperan dalam membentuk sikap berpihak (partiship) seseorang. Komposisi keterlibatan orang tua atau keluarga responden dengan salah satu partai politik dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 10

Keterlibatan Keluarga Responden
Dengan Salah satu Partai Politik

Keterlibatan Keluarga	Jumlah	Persentase
Ada	2	4
Tidak Ada	48	96
Jumlah	50	100

Berdasar hasil survey, ternyata hanya dua orang responden saja yang anggota keluarganya memiliki keterkaitan

dengan salah satu partai politik. Anggota keluarga yang dimaksud di sini adalah kakak dan ayah dari responden dan partai politik yang dimaksud adalah PPP. Sedangkan yang lainnya menyatakan tidak memiliki anggota keluarga yang memiliki keterlibatan dengan salah satu partai politik.

Selain keluarga, kelompok (peer groups) merupakan agen sosialisasi yang penting bagi seseorang. Dalam suatu kelompok, seseorang akan mengalami proses sosialisasi yang tentu saja sedikit banyak akan mempengaruhi sikap maupun pilihan politiknya. Pada penelitian ini diajukan juga pertanyaan mengenai keterlibatan responden dengan organisasi agama. Hanya saja, ternyata tidak ada responden yang memiliki keterlibatan langsung dengan organisasi agama. Keterlibatan responden dengan organisasi sosial dan politik dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 11

Keterlibatan Responden dengan Organisasi Sosial dan Politik

Organisasi	Ya	Tidak
Sosial	50 (100%)	0
Politik	2 (4%)	48 (96%)

Dari tabel di atas, tampak bahwa hanya sedikit responden (4%) yang memiliki keterlibatan dengan organisasi politik. Sedangkan sisanya mengaku tidak memiliki keterlibatan dengan satu pun organisasi politik (96%). Namun, untuk organisasi sosial, semua responden menyatakan memiliki keterlibatan dengan Organisasi Nahdhatul Ulama (NU).

f. Alasan-Alasan Responden Memilih

1. Mengikuti Anjuran Tokoh Masyarakat

Anjuran tokoh masyarakat yang dimaksud di sini adalah anjuran yang diberikan oleh tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya kepada responden untuk memilih salah satu dari delapan pasangan calon Bupati/wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011 dan anjuran memilih salah satu partai politik pada pemilu legislatif anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2014. Komposisi responden yang menyatakan alasan mereka memilih adalah karena mengikuti anjuran tokoh masyarakat dengan responden yang tidak menjadikan hal ini sebagai alasan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 12

Alasan Memilih Mengikuti Anjuran Tokoh Masyarakat

Mengikuti Anjuran Tokoh Masyarakat	Jumlah	Persentase
Ya	44	88
Tidak	6	12
Jumlah	50	100

Hasil survey menunjukkan hanya sebagian besar (88%) responden yang menyatakan bahwa alasannya memilih salah satu pasangan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tasikmlaya tahun 2011 didasari atas keinginan mengikuti anjuran yang diberikan oleh tokoh masyarakat terutama para kiyai. Sedangkan yang lainnya (12% responden) tidak menjadikan hal itu sebagai alasan memilih mereka.

Namun, sebagian besar responden mengaku pernah mendapatkan anjuran dari beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih pasangan UU Rukmana dan...pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya secara langsung pada tahun 2011. Begitu juga pada pemilu legislatif dianjurkan untuk memilih PPP.

2. Visi/Misi dan Program

Program kandidat yang dimaksud di sini adalah program atau visi yang diungkapkan delapan pasang calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat pelaksanaan kampanye dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya secara langsung pada tahun 2011. Mereka berpendapat bahwa program yang di kampanyekan tidak jauh berbeda antara satu calon dengan calon lainnya. Program tersebut berkisar sekitar membangun suasana religiusitas, kesejahteraan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, infrastruktur diperbaiki dll.

Program-program yang dikampanyekan tersebut karena memiliki substansi yang sama atau mirip maka bagi pemilih kurang menjadi pilihan dalam memilih calon, sehingga ketika kampanye sebagian yang mengikuti kampanye hanya sebatas mengikuti hiburan semata, seperti dimunculkannya penyanyi-penyanyi lokal, arak-arakan, makan bersama, dll.

3. Partai Pendukung

Partai pendukung kandidat dimaksud di sini adalah partai atau gabungan partai yang mendukung pencalonan. Dalam realitas politik di Kabupaten Tasikmalaya faktor partai politik cukup dominan, terutama bagi para kader atau simpatisan PPP,

sehingga keberhasilan pilkada langsung tahun 2011 dan pileg DPRD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014, terjadi sinergi dimana kedua kontestasi tersebut di menangkan PPP. Memang dalam perkembangan PPP terutama di Jawa Barat basis utamanya terdapat di Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai basis ideologis PPP.

Pada era reformasi pun dimana setiap daerah terjadi perubahan orientasi politik, akan tetapi khusus di daerah Kabupaten Tasikmalaya tetap PPP mendominasi realitas politik. Ketika ditanya kepada salah satu responden, kenapa memilih PPP, ia menjawab bahwa sudah dari turun temurun mulai dari kakek saya senantiasa memilih PPP, dan kami percaya bahwa PPP adalah partai Islam yang membawa misi ke-Islaman.

Pada hal secara tradisi keagamaan Islam serta banyaknya pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa realitas tersebut merupakan basis dari Nadhatul Ulama (NU), sedangkan NU memiliki partai sendiri yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Akan tetapi eksistensi PPP tetap menjadi idaman masyarakat walaupun PKB juga tetap mendapat tempat di Kabupaten Tasikmalaya.

C. Pembahasan/Analisis

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi perilaku pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. Faktor yang mempengaruhi tersebut dapat meliputi antara lain faktor ketokohan. Faktor tersebut bukan karena semata ketokohan dari kandidat tetapi tokoh-tokoh masyarakat dalam hal ini para kiyai mengarahkan pemilih untuk memilih kandidat atau partai. Pada pemilihan anggota legislatif diarahkan untuk memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan pada waktu pemilukada langsung diarahkan untuk mendukung calon yang didukung PPP. Sehingga terjadi keserasian atau konsisten perilaku pemilih untuk senantiasa memilih PPP. Hal tersebut terjadi karena faktor penggiringan oleh para tokoh kiyai tersebut.

Secara teoritis memang .suatu konsep yang selalu dibahas bersama dengan kekuasaan adalah pengaruh. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana orang mendapatkan pengaruh atau kekuasaan. Pengaruh atau kekuasaan itu merupakan penghargaan masyarakat terhadap orang-orang yang dianggap cakap atau memiliki keahlian tertentu, atau kedudukan atau kekayaan. Miriam Budiardjo, menyatakan bahwa sumber-sumber kekuasaan itu bisa berupa kedudukan, status kekayaan, kepercayaan, agama, kekerabatan, kepandaian, dan

keterampilan.³⁷ Pendapat seiring dikemukakan Charles F. Andrain yang menyebutnya sebagai sumber daya kekuasaan, yakni: sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal, dan keahlian.³⁸

Orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat adalah sekelompok kecil yang sering disebut dengan elite. Lipset dan Solari menunjukkan bahwa elite adalah mereka yang menempati posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan.³⁹ Pernyataan seiring dikemukakan oleh Czudnowski bahwa elite adalah mereka yang mengatur segala sesuatunya, atau aktor-aktor kunci yang memainkan peran utama yang fungsional dan terstruktur dalam berbagai lingkup institusional, keagamaan, militer, akademis, industri, komunikasi, dan sebagainya. Field dan Higley menyederhanakannya dengan mengemukakan bahwa elite adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci, yang secara awam dipandang sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang

³⁷ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm 13

³⁸ Charles F. Andrian, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 132.

³⁹ Lipset dan Solari dalam J.W. Scoorl, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 128.

membuat kebijakan umum, yang satu sama lain melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya.⁴⁰

Berdasar uraian di atas, faktor ketokohan atau elit sangat mempengaruhi perilaku politik masyarakat sebagai mana studi yang dilakukan Liddle dan Mujani yang menyimpulkan bahwa faktor ketokohan menjadi tulang punggung untuk meraih suara. Ketokohan Habibie di Golkar menjelaskan mengapa proporsi pemilih Golkar di Sulawesi pada Pemilu 1999 sangat besar (67%) dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Begitu juga faktor ketokohan Megawati berperan besar terhadap perolehan suara PDIP. Demikian juga faktor ketokohan Amien Rais dalam PAN dan Gus Dur dalam PKB.⁴¹

Kesimpulan yang sama juga terdapat pada hasil penelitian yang dilakukan J. Kristiadi tentang perilaku pemilih pada Pemilu 1987-1992 di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Studi yang dilakukan ini mengambil sampel masyarakat desa dan kota yang berbeda karakternya. Hasil yang diperoleh menyimpulkan bahwa interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia masih paternalistis, terutama antara anggota dan pimpinan

⁴⁰ Field dan Higley sebagaimana dikutip Dwaine Marvick, dalam Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 285.

⁴¹ Wiliam Liddle dan Mujani, Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan Nasional Menentukan Pilihan Partai Politik, dalam *Harian Kompas* edisi Jum'at, 1 September 2000.

masyarakat. Pimpinan masyarakat, baik formal maupun informal, diperlakukan sebagai tokoh panutan dengan pengaruh dan derajat keterikatan yang berbeda-beda.⁴²

Weber memberikan istilah dengan istilah otoritas tradisional yaitu tipe otoritas ini berlandaskan pada suatu kepercayaan yang mapan terhadap kekudusan tradisi-tradisi zaman dulu serta legitimasi status mereka yang menggunakan otoritas yang dimilikinya. Jadi alasan penting orang taat pada struktur otoritas itu ialah kepercayaan mereka bahwa hal itu sudah selalu ada. Mereka yang menggunakan otoritas termasuk dalam satu kelompok status yang secara tradisional menggunakan otoritas atau mereka dipilih sesuai dengan peraturan-peraturan yang dihormati sepanjang waktu.⁴³

Dalam kasus Jawa Barat terdapat beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli, yang menunjukkan bahwa faktor ketokohan itu sangat signifikan mempengaruhi perilaku politik masyarakat, sebagaimana yang di kemukakan oleh Karl D. Jackson dalam karyanya *Kewibawaan Tradisional, Islam, Dan Pemberontakan Kasus Darul Islam*

⁴² Lihat J. Kristiadi, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia: Suatu Studi Kasus Tentang Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Pemilihan Umum tahun 1987-1992*, Disertasi, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1994.

⁴³ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (di Indonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang) (Jakarta: PT. Gramedia, 1988) hlm. 226-232

Jawa Barat. Ia mengambil sampel tiga desa di Kabupaten Garut yang menjadi penopang terhadap pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat.

Karl D. Jackson mengatakan bahwa integrasi politik di kalangan orang Sunda bergantung kepada sistem hubungan kewibawaan tradisional yang menjiwai kehidupan sosial desa serta mempertalikan setiap desa dengan dunia politik daerah dan nasional yang ada di balik pintu gerbang desa. Boleh dikatakan semua orang desa Sunda terorganisasi ke dalam jaringan hubungan diadik (berpasangan) yang bersifat pribadi, menyebar, penuh perasaan dan lestari. Sekalipun hubungan ini pada mulanya bersifat sosial dan ekonomi, namun dapat mempunyai siratan-siratan politik yang mendalam apabila seorang tokoh kewibawaan tradisional tertentu atau para tetua desa sebagai kelompok, menjadi terlibat ke dalam politik luar desa. Berpangkal pada rasa kewajiban moral, para pengikut seorang tokoh kewibawaan tradisional akan menuruti perintahnya sekalipun tindakan-tindakan yang dikehendaki mungkin tampak bertentangan setidak-tidaknya bagi pengamat

luar, dengan kepentingan-kepentingan ekonomi, kepercayaan agama atau nilai-nilai ideologi para pengikut.⁴⁴

Kewibawaan tradisional sebagai sistem kekuasaan merupakan gejala yang ada di desa-desa Sunda pada umumnya.⁴⁵ Jackson menyamakan kewibawaan tradisional dengan *sistem patron klien*, walaupun hubungan dalam kewibawaan tradisional lebih emosional yang berbeda dengan *sistem patron klien* atau lebih jelasnya lebih bersifat bapak-anak. Jackson merujuk bahwa banyak kepustakaan yang menunjukkan bapakisme dan akibatnya atas perilaku politik Indonesia, di antaranya ditemui dalam tulisan Feith, Geertz, Koentjaraningrat, Selo Soemardjan.⁴⁶

Begitu pula penelitian yang dilakukan Hiroko Hirokosi dalam bukunya “Kiyai dan Perubahan Sosial”, dengan melakukan penelitian terhadap Kiyai di Desa Cipari Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat yaitu Kiyai Yusuf Tajiri. Ia

⁴⁴ Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam, Dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 3

⁴⁵ Karl D. Jackson, *Ibid.*, hlm 263.

⁴⁶ Karl D. Jackson, *Ibid.* Lihat Feith (*The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, 1962, hlm 115), Geertz, (*The Religion of Java*, 1960, hlm 25-29); Koentjaraningrat, (*Villages in Indonesia*, 1967, hlm 279); Selo Soemardjan, (*Social Change in Jogjakarta*, 1962, hlm 138-139)

menjelaskan bahwa Kiyai menduduki posisi sentral dalam masyarakat Islam pedesaan dan menyatakan berbagai golongan hingga mampu melakukan tindakan kolektif, jika diperlukan. Dia mengambil peran sebagai poros hubungan antara umat dengan Tuhan. Pada pandangan sebagian besar pengikutnya, kiai adalah contoh muslim ideal yang ingin mereka capai. Dia seorang yang dianugrahi pengetahuan dan rahmat Tuhan. Sifat hubungan antara kiyai dengan masyarakat adalah kolektif. Kiai terkesan sebagai pemimpin simbolis yang tak gampang ditiru oleh orang biasa.⁴⁷

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saking besarnya pengaruh kiyai di mana para petani muslim selalu bertumpu pada kepemimpinan dan bimbingan mereka baik dalam masalah-masalah bersama maupun pribadi, dan para kiyai pun sangat tanggap terhadap harapan-harapan tersebut dengan bertindak sebagai pembela kepentingan masyarakat dan pewaris ortodoksi Islam. Sebagai kelompok, sebagian mereka telah memberikan dorongan bagi lahirnya semacam gerakan petani seperti laskar Hisbullah dan Sabilillah pada masa perang kemerdekaan (1945-1949), Gerakan Darul Islam (gerakan Negara Islam) 1948-1962, pemberontakan di luar Jawa (1958-

⁴⁷ Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 232.

1962) dan beberapa pemberontakan lainnya pada masa penjajahan. Pentingnya posisi kiyai ini banyak juga yang ditulis misalnya oleh Geertz dalam bukunya “ *The Javanese Kijaji : the Changing Roles of a cultural Broker* (1960).⁴⁸

Faktor yang cukup dominan selain faktor ketokohan adalah adanya solidaritas yang kuat diantara pemilih. Solidaritas tersebut terbentuk baik berdasarkan kelompok pesantren, atau sama-sama harus santri atau merupakan jaringan dari komunitas pesantren. Dengan demikian kandidat atau partai yang memenangkan persaingan dalam pemilu tersebut yang PPP di samping telah memiliki networking politik juga telah menanamkan sosial kapital di tengah masyarakat.

Secara teoritis bahwa dalam teori sosial kapital melihat manusia yang tidak bisa lepas dari kelompok/komunitas dan senantiasa membutuhkan kelompok. Sosial kapital terlahir dari individu-individu yang berkelompok berdasarkan kesamaan suku, etnik, agama atau kepentingan untuk membentuk suatu komunitas yang dapat melindungi dan bekerjasama bagi kepentingan kelompoknya. Durkheim mengatakan bahwa solidaritas itu terbangun karena persamaan.⁴⁹ Maurice

⁴⁸ Hiroko Horikoshi, *Ibid.*, hlm. 4

⁴⁹ Durkheim, *Op. cit*

Duverger mengistilahkan dengan *solidaritas proximitas*; bentuk solidaritas melalui kesamaan.⁵⁰ Komunitas yang terbentuk ini dapat memiliki ikatan yang kuat antar individu sehingga dapat membentuk norma/nilai bersama yang dapat mengendalikan dan memberikan solidaritas yang utuh atas berbagai kejadian yang mengancam atau menghancurkan eksistensi kelompok tersebut, terutama ancaman dari luar.

Maurice Duverger menguraikan lebih lanjut tentang *solidaritas proximitas* ini dengan terbentuknya kelompok-kelompok yang berdasarkan teritorial, kelompok-kelompok berdasarkan korporat, dan kelompok-kelompok yang berdasarkan ideologis. Kelompok teritorial terbangun lebih disebabkan adanya solidaritas karena dekat yang merupakan varian dari solidaritas karena sama. Kedekatan merupakan keserupaan dengan kondisi-kondisi hidupnya yang serupa, dia menghasilkan kesamaan yang lain, ada yang tergantung pada kondisi-kondisi geografis (yang menyebabkan kesamaan morfologis, mores, dan cara hidup), yang lain hanya berasal dari hubungan langsung yang disebutkan oleh kedekatan (kesamaan dalam bahasa, fenomena imitasi). Kelompok-

⁵⁰ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 188-250

kelompok korporatif, sebagaimana kelompok-kelompok teritorial, maka kelompok-kelompok korporatif tergantung pada berbagai jenis solidaritas melalui kesamaan, solidaritas yang menyatukan orang-orang yang sekarang mengambil bagian – atau dulu mengambil bagian – pada jenis kegiatan yang sama. Kelompok-kelompok profesional adalah kelas dari kelompok korporatif yang paling penting, akan tetapi bukanlah satu-satunya. Dalam arti sempit, kelompok korporatif mempersatukan orang yang terlibat di dalam kegiatan profesional tertentu. Kelompok-kelompok para profesional ini kadang-kadang memainkan peranan penting pada tingkat-tingkat kompetisi politik tertentu.⁵¹

Selain itu ada kelompok-kelompok ideologi yaitu kelompok-kelompok dengan tubuh keyakinan ideologis yang sama. Gereja-gereja, sekte-sekte filosofis, “masyarakat intelektual” dan partai-partai politik merupakan kelompok-kelompok ideologis. Sebuah doktrin menjadi ideologi ketika suatu kelompok sosial menganutnya, ketika dia berhenti menjadi sebagai hanya bangunan intelektual dari seorang pemikir dan menjadi suatu ekspresi dari aspirasi, keinginan, dan keyakinan suatu kelompok orang (kelas, bangsa dan seterusnya). Sampai ke tingkat bahwa kelompok ini berbeda

⁵¹ *Ibid*

dari kelompok lain, dan mempunyai organisasi dan lembaga, dia merupakan kelompok ideologis.⁵²

Solidaritas yang terbangun karena kesamaan dapat melahirkan perasaan identitas bersama yang pada mulanya masih dihambat oleh adanya solidaritas dengan lingkungan sosial langsung, kelompok etnis, atau kelompok asal daerah. Tapi suatu kesadaran mengenai realitas sering muncul karena peristiwa-peristiwa dramatis, ketika masing-masing anggota kelompok mengalami tekanan yang sama oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial dan politik, sehingga terbentuklah organisasi internal. Dahrendorf menamakan kelompok itu dengan istilah kuasi-kelompok.⁵³

Kuasi-kelompok ini dengan cara demikian akan berubah menjadi kelompok strategis, karena secara strategis pula mereka mempunyai arti yang penting untuk perkembangan politik, situasi konflik, reformasi ataupun revolusi dalam masyarakat masing-masing. Secara aktif mereka mewakili tujuan politik atau ekonominya sendiri. Mereka cenderung menunjang kegiatan-kegiatan pemimpinnya yang muncul dari kalangan sendiri, atau pemimpin-pemimpin yang dianggapnya mewakili

⁵² Maurice Duverger, *Ibid.*

⁵³ Dahrendorf dalam Hans-Dieter Evers dan Tilman Schiel, *Kelompok-Kelompok Strategis* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm 12

keinginan-keinginannya. Dengan demikian, kelompok strategis merupakan lahan untuk mengerahkan pemimpin-pemimpin politik dan sekaligus merupakan *Pressure Group* (yang berkuasa).⁵⁴

Proses pembentukan kelompok tidak harus linier, tetapi dapat juga dihentikan sehingga menciptakan suatu keadaan yang membingungkan serta konflik yang berkepanjangan. Contoh untuk itu diberikan oleh Clifford Geertz. Dalam penelitiannya mengenai sejarah sosial sebuah kota di Jawa, ia menggambarkan terjadinya kelompok strategis dari kelompok-kelompok profesi. Ia lalu menganalisis, bagaimana kelompok yang dinamakannya sebagai pengelompokan-pengelompokan sosio-kultural tingkat pertama, mengalami perubahan, terpecah dan menjadi aliran semasa revolusi, ketidakstabilan politik dan depresi ekonomi. Pembentukan kelompok strategis berarti modernisasi, sedangkan menguatnya sistem aliran merupakan suatu langkah mundur ke model tradisional tanpa benar-benar menciptakan suatu masyarakat tradisional yang terintegrasi. “Kedua-duanya, tradisi dan modernitas, kelihatannya semakin mundur, sebaliknya yang jelas tertinggal adalah sisa dari yang

⁵⁴ Hans-Dieter Evers dan Tilman Schiel, *Ibid*, hlm 12. Mereka mengistilahkan kuasi-kelompok dengan nama kelompok strategis.

pertama dan salinan dari yang kedua. Jika dilihat dalam kaleidoskop, terlihat bahwa masa lalu telah sangat jauh tertinggal dan masa depan juga masih jauh di muka.”⁵⁵

Penelitian terkenal oleh Barrington Moore (1969) yang memusatkan perhatiannya kepada bermacam-macam kelompok strategis: kelas tuan tanah, petani, administrasi pemerintahan dan borjuis perkotaan. Naiknya setiap golongan ke pusat kekuasaan dengan cara bertahap atau pun dengan revolusi, membentuk kerangka munculnya sistem politik yang beraneka ragam dalam dunia modern. Penelitian yang dilakukannya mengenai Inggris, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan India, menyebablan ia membedakan dunia modern dalam 3 arus utama: revolusi dari atas, dengan antara kelas terpelajar dan kaya dengan birokrasi, akan menimbulkan fasisme; revolusi borjuis yang dilakukan oleh borjuis perkotaan menimbulkan demokrasi model Barat; dan revolusi petani menimbulkan komunisme.⁵⁶

Selanjutnya faktor yang cukup dominan mempengaruhi perilaku pemilih di Kabupaten Tasikmalaya adalah faktor ideologis, dimana keberpihakan kepada PP bukan hanya

⁵⁵ Geertz, *The Social History of an Indonesian Town* (Cambridge Mass, 1965), hlm 152-160

⁵⁶ Barrington Moore dalam Hans-Dieter Evers dan Tilman Schiel, *op.cit.*, hlm 14

sebatas keberpihakan kepartaian tetapi sudah menjadi mideologi, yang bersifat turun temurun. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa wawancara bahwa mereka memilih PPP atau calon yang didukung PPP karena sudah turun temurun yang dipahami sebagai partai Islam.

Secara teoritis bahwa ikatan kuat yang bersifat ideologis terhadap partai politik merupakan kategori kelompok ideologis, dimana ada kelompok-kelompok ideologi yaitu kelompok-kelompok dengan tubuh keyakinan ideologis yang sama. Gereja-gereja, sekte-sekte filosofis, “masyarakat intelektual” dan partai-partai politik merupakan kelompok-kelompok ideologis. Sebuah doktrin menjadi ideologi ketika suatu kelompok sosial menganutnya, ketika dia berhenti menjadi sebagai hanya bangunan intelektual dari seorang pemikir dan menjadi suatu ekspresi dari aspirasi, keinginan, dan keyakinan suatu kelompok orang (kelas, bangsa dan seterusnya). Sampai ke tingkat bahwa kelompok ini berbeda dari kelompok lain, dan mempunyai organisasi dan lembaga, dia merupakan kelompok ideologis.⁵⁷ dimana kuatnya sebuah partai politik apabila partai tersebut memiliki kekuatan ideologis.

Dalam perspektif teori perilaku pemilih bahwa perilaku pemilih di Kabupaten Tasikmalaya dengan realitas senantiasa

⁵⁷ Maurice Duverger, *Ibid.*

konsisten untuk memilih mayoritas PPP atau calon yang dicalonkan PPP, hal tersebut karena faktor psikologis walaupun teori tersebut dikategorikan rasionalis tetapi itulah realitas politik. Sebagaimana yang dikatakan Gabriel Almond, faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik, antara lain: pendidikan tinggi, status sosial-ekonomi dan keanggotaan dalam partai politik.⁵⁸ Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik, meliputi:⁵⁹

- (a) Kelas: perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan pekerjaan yang serupa;
- (b) Kelompok/komunal: perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama
- (c) Lingkungan (*neighborhood*); perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu-sama lain
- (d) Partai; perorangan-perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan

⁵⁸ Gabriel A. Almond, *Political Socialization and Culture and Political Participation*, dalam *Comparative Politics Today* (Boston: Little, Brown and Company, 1974).

⁵⁹ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries*, alih bahasa Sahat Simamora (Jakarta: Rika Cipta, 1990), hlm. 21.

- (e) Golongan (*faction*); perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron-klien, artinya, satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal-balik di antara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

Dari uraian di atas jelasnya tingkah laku politik seseorang sangat dipengaruhi oleh keanggotaan mereka dalam kelompok sosial serta norma-norma yang dianut oleh kelompok sosial tersebut. Dengan demikian norma kelompok menentukan norma dan tingkah laku individu.⁶⁰

⁶⁰ Lihat Riswanda Imawan, *Dinamika Pemilu dalam Pemilu 1992*, Makalah, disampaikan pada pertemuan CSIS di Jakarta, 9 Juli 1993. Lihat juga Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Social Behavior* (London: George and Unwin, 1983), hlm. 83-87. Contoh hasil penelitian yang pernah dilakukan di AS dengan menggunakan pendekatan sosio-kultural menunjukkan bahwa pilihan terhadap suatu partai yang dilakukan oleh seorang anak cenderung mengikuti pilihan orang tua mereka. Orang-orang yang tergolong dalam WASPs (*white-Anglo-Saxon-Protestan*) yang umumnya memiliki status sosial ekonomi tinggi cenderung memilih Republik, dan orang-orang yang status sosialnya rendah, khususnya orang Katolik, orang Negro, orang keturunan Polandia, Irlandia dan Italia, yang mempunyai derajat rendah cenderung memilih Demokrat. Laki-laki lebih partisipatif dibanding wanitanya, karena adanya pandangan khususnya di tingkat masyarakat yang status sosialnya rendah bahwa tepatnya wanita adalah mengurus rumah mereka, masalah politik adalah dunia laki-laki. Sedangkan wanita-wanita yang berpendidikan tinggi, mereka menganggap bahwa urusan-urusan politik adalah urusan mereka juga. Lihat Austin Runney, *Sociology of Voting*, dalam *Politics and Voters*, ed. Hugh A. Bone and

Mashab Michigan (*Pendekatan Psikologis*)

menggarisbawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi. Menurut Greenstein, seperti dikutip Asfar,⁶¹ sikap memiliki tiga fungsi. *Pertama* fungsi kepentingan, bahwa penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, fungsi penyesuaian diri, bahwa seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. *Ketiga*, fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, bahwa upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi.

Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak seorang calon pemilih masih berusia dini. Pada usia dini, seorang calon pemilih telah menerima "pengaruh" politik dari orang tuanya, baik dari komunikasi langsung maupun dari pandangan politik yang

Austin Runney (New York: McGraw Hill Book Company, 1981), hlm. 17-31.

⁶¹ Asfar, M. *Ibid.*

diekspresikan orang tuanya. Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok acuan seperti pekerjaan, kelompok pengajian, dan sebagainya. Proses panjang sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Ikatan seperti inilah yang disebut sebagai identifikasi partai. Denver menegaskan bahwa pilihan seseorang harus dipahami sebagai pernyataan loyalitas (identifikasi partai) yang dibentuk oleh pengalaman (sosialisasi) sepanjang hidup.⁶² Dengan demikian kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah inti dari mashab psikologis untuk menjelaskan perilaku seseorang dalam pemilu.⁶³

⁶² Denver dalam Muhammad Asfar, *Ibid.*, hlm 50

⁶³ Adnan Nursal, *Op.Cit*, hlm. 59.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang melandasi perilaku pemilih di Kabupaten Tasikmalaya, antara lain; pertama, pengaruh dari para kiyai, dimana para kiyai pimpinan pondok membangun jaringan alumni pondok, sehingga ada keseragaman dalam dukungan politik. Kedua, ikatan kepartaian, ikatan kepartaian dimaksud bahwa sebagian pemilih di Kabupaten Tasikmalaya memilih karena sudah turun-temurun memilih kepada PPP. Ketiga, karena kandidat di tawarkan oleh PPP senantiasa berasal dari alumni pondok bahkan para kiyai nya yang mencalonkan, sehingga ada kesamaan motivasi pilihan antara pemilih dengan yang di pilih.

Konsistensi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya antara pemilihan Kepala Daerah tahun 2011 dan pemilihan anggota Legislatif tahun 2014, dimana di menangkan oleh satu partai yakni PPP, bagi sebagian pemilih, karena mereka pendukung fanatik PPP dan berdasar pada faktor-faktor di atas, maka setiap yang dicalonkan oleh PPP mereka akan mendukungnya.

Sedangkan polarisasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya, golongan santri, nasionalis religius dan abangan.

B. Saran

Setelah melakukan kajian mendalam dapat direkomendasikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini baik bagi akademisi maupun pelaku politik, antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan dengan meneliti sekitar perubahan pemilih, dimana terdapat basis-basis pesantren yang senantiasa terdapat perubahan dalam pemilu, penting untuk diteliti faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku pemilih tersebut.
2. Bagi para pelaku politik atau partai politik, hendaknya melakukan pendidikan politik sehingga bukan hanya faktor ideologis, atau ketokohan semata masyarakat memilih tetapi penting untuk melihat visi, misi dan program baik yang dilakukan partai politik, atau kandidat dari partai politik baik untuk calon Bupati/Wakil Bupati maupun bagi calon anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, *The Political Behavioral of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989.
- *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1990
- _____, dan Nazaruddin Sjamsuddin, (eds), *Propil Budaya Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Grafitti Press, 1991
- Amal, Ichlasul. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1996
- Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Benda, Harry J, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Boland, B.J, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1985.
- Budiardjo, Miriam, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991
- Bulkin, Farchan, *Pengantar Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1985.

- Croissant, Aurel, dkk. *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*, Jakarta: Fredrich Ebert Stiftung Indonesia, 2003.
- Crouch, Harold, *Militer dan Politik*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- Dahl, Robert A. *On Democracy*, Yale University Press, 1999
- Ecomora, J. Eliseo, *Nasionalisme Mencari Ideologi*, Jakarta: Grafiti, 1991.
- Emerson, Donald K. *Indonesia Beyond Soeharto*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, second edition, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1971.
- Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik*, Jakarta' PT. Bina Aksara
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* Cet. III, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- Gresnstein, Fred dan Nelson Polsby (eds), *Handbokk of Political Science*, Vol 3. Reading Mass, Addison-Wesley, 1977.
- Hiroko Horikoshi, *Kiyai dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa, Jakarta: P3M, 1987

- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti, 1995.
- Ingleson, John, *Jalan ke Pengasingan*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Jackson, Karl D. *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan, Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Grafiti, 1990.
- Karim, M. Rusli, *Perjalanan Partai Politik, Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Keller, Suzanne, *Pemberontakan Petani Banten 1988*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Koeber, A.P.E, *Sarekat Islam, gerakan Ratu Adil?*, Jakarta: Graffiti Pers, 1985.
- Kurasawa, Aiko, *Mobilisasi Dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, alih bahasa Hermawan Sulisty, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993
- Lev, Daniel S. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959*, Ithaca: modern Indonesian Project, 1966.
- Liddle, William. *Pemilu-Pemilu Orde Baru Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Noer, Deliar, *Partai-Partai Islam Di Pentas Nasional*, Jakarta” Grafiti Pers, 1987

_____, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*,
Jakarta: LP3ES, 1980

Rauf, Maswadi. *Konsensus dan Konflik Politik Sebuah
Penjajagan Teoritis*, Jakarta: DIKTI Diknas, 2001.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT
Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.